



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/2015/2022
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan khususnya di bidang kearsipan perlu penyeragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa ketentuan pengelolaan kearsipan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memperoleh keseragaman dalam penggunaan pola klasifikasi arsip;

- b. mewujudkan tata kelola kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis;
 - c. menunjang kodifikasi dalam pemberkasan arsip dinamis di dalam sistem pemberkasan (*filing system*); dan/atau
 - d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.
- KETIGA : Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
- a. fasilitatif, yang merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan; dan
 - b. substantif, merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.
- KEEMPAT : Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan sistem pengodean yang merupakan kombinasi huruf dan angka.
- KELIMA : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan identitas unit kerja pusat meliputi Pimpinan Unit Kerja Pusat, Pejabat Administrator dan Pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran, dan *Project Manager Officer* (PMO) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Kode unit pengolah pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan diatur oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan.
- KETUJUH : Kode unit pengolah untuk tim kerja diatur oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Health, Republic of Indonesia. The text inside the stamp reads "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top, "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2022
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE
UNIT PENGOLAH

KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH

I. PENDAHULUAN

Kode klasifikasi arsip digunakan untuk melakukan penataan berkas dengan sistem masalah. Adapun tujuan penggunaan kode klasifikasi arsip ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Kode klasifikasi arsip yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang secara tidak langsung mengubah “struktur kegiatan” dan “permasalahan” yang digunakan sebagai dasar klasifikasi atau pengelompokan arsip.

Kode klasifikasi arsip disusun sebagai sarana penataan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali, sampai dengan penyusutan arsip. Dengan kode klasifikasi arsip diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan pemberian kode klasifikasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkandung dalam surat/arsip secara tepat dan benar.

Kode klasifikasi arsip ini dibedakan menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Fungsi fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan dan fungsi substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

II. SISTEMATIKA POLA KLASIFIKASI ARSIP

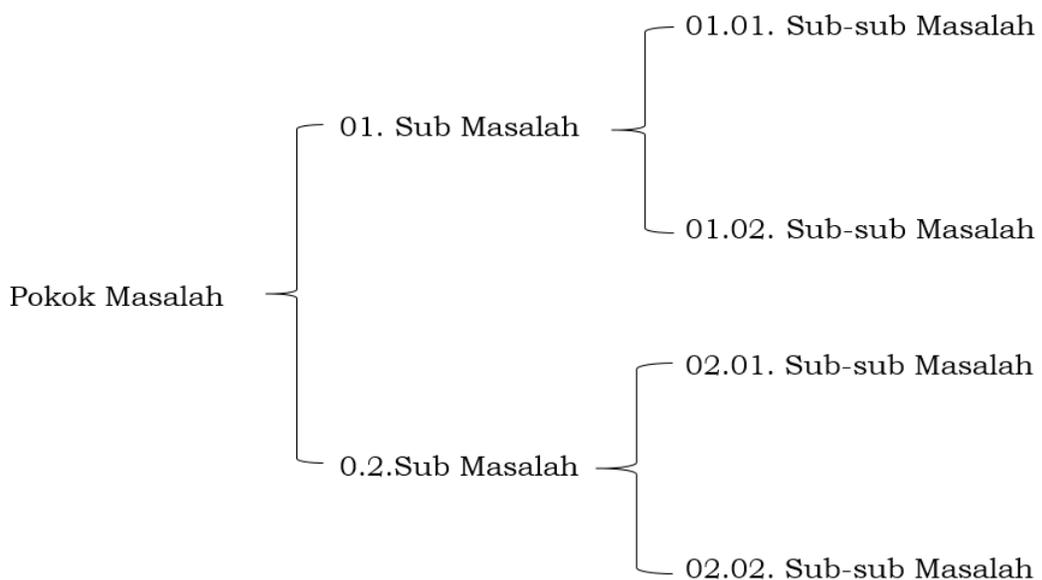
Kode klasifikasi arsip diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.

A. Sistem Klasifikasi

Klasifikasi arsip dengan sistem ini (struktur kegiatan dan permasalahan) dapat digunakan oleh setiap organisasi, sebagai contoh klasifikasi masalah “kepegawaian” tidak berarti bahwa yang boleh menggunakan hanya “Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia” atau “Bagian Kepegawaian” saja, tetapi unit kerja/satuan kerja lain dapat menggunakannya.

Klasifikasi disusun berdasarkan pada pengelompokan menurut masalah (*subject*). Kegiatan yang terdiri dari beberapa masalah pokok (*main subject*) dan setiap masalah pokok dapat terdiri dari beberapa sub masalah (*sub-subject*) dan tiap sub-sub masalah (*sub-sub-subject*).

Contoh Klasifikasi Arsip Masalah Kepegawaian:



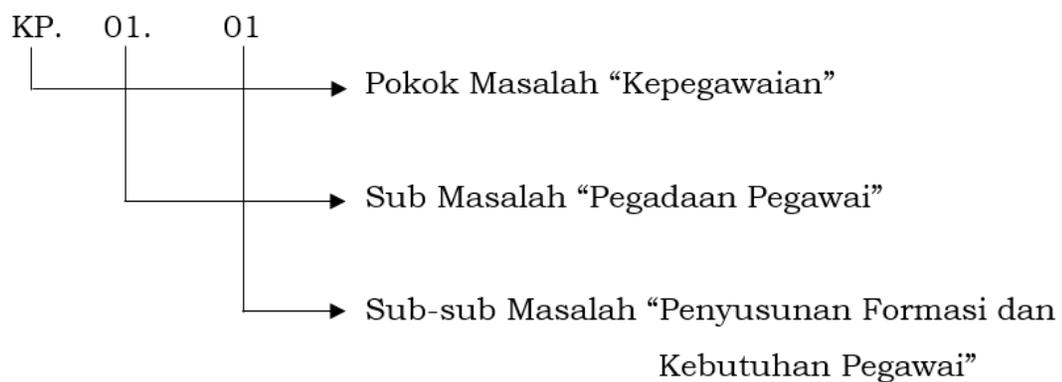
Pokok Masalah	Sub Masalah	Sub-sub Masalah
1	2	3
KP. Kepegawaian	01. Pengadaan Pegawai	01.01. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai 01.02. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 01.03. Identitas Pegawai Negeri Sipil 01.04. Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus

	02. Mutasi Pegawai	01.05. Mutasi Pegawai 02.01. Kenaikan Pangkat 02.02. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 02.03. Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun 02.04. dst.
	03.....dst	

B. Kode Klasifikasi

Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal pada arsip, dengan maksud untuk menyingkat tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang dipergunakan untuk pemberian kode di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah alfanumerik yaitu penggabungan kode huruf dan angka. Kode huruf digunakan untuk mengenali masalah pokok, sedangkan kode angka untuk sub-masalah dan sub-sub-masalah.

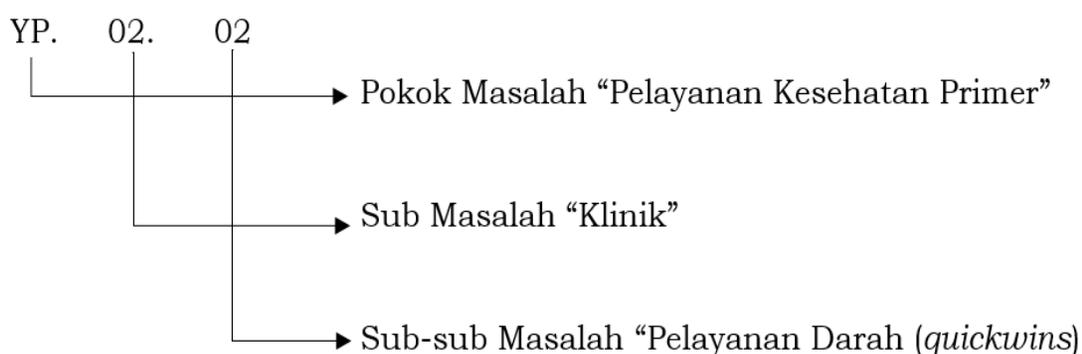
Contoh – I (Fasilitatif):



Penggunaan kode klasifikasi arsip KP.01.01 adalah untuk sub-sub-masalah yang ada kaitannya dengan naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi *bezetting* dan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan,

Kesehatan formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus (insidental), baik untuk persiapan penyusunan kebijakan (norma, standar, prosedur, kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian, supervisi dan lain sebagainya), persiapan untuk sosialisasi (seminar, lokakarya, pemantapan, diseminasi, dan lain sebagainya) dan persiapan kegiatan lainnya meliputi undangan peserta, narasumber, moderator, surat tugas, nota dinas, telaah, kajian maupun laporan kegiatan.

Contoh – II (Substantif)



Penggunaan kode klasifikasi arsip YP.02.02 adalah untuk sub-sub masalah berkaitan dengan naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan darah (*quickwins*) yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah dan rumah sakit meliputi persiapan penyusunan pedoman (norma, standar, prosedur, kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian, supervisi dan lain sebagainya), persiapan untuk sosialisasi (seminar, lokakarya, pemantapan, diseminasi dan lain sebagainya), persiapan penyusunan *memorandum of understanding*, dan persiapan kegiatan lainnya meliputi undangan peserta, narasumber, moderator, surat tugas, nota dinas, telaah, kajian maupun laporan kegiatan.

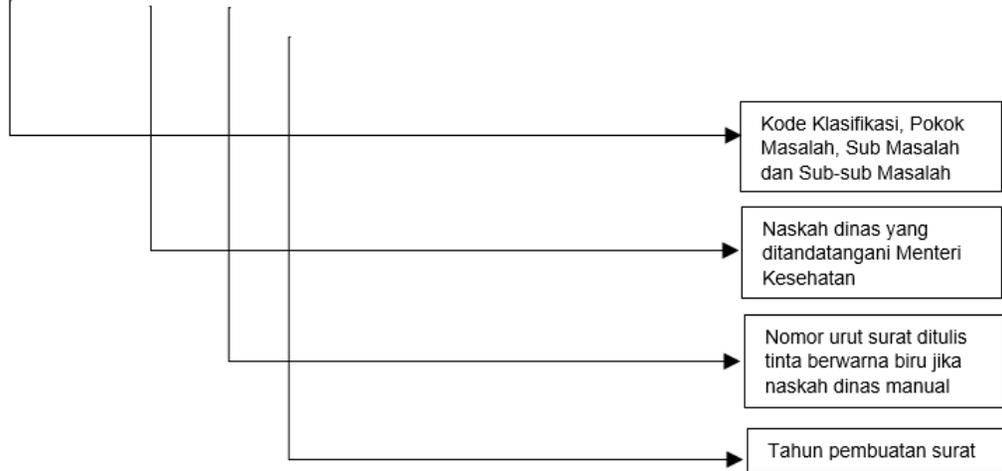
B. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran surat di lingkungan Kementerian Kesehatan mengacu pada kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah. Berdasarkan kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah dapat mempermudah klasifikasi jenis surat ketika melakukan pengarsipan serta mempermudah penyimpanan dan pencarian arsip.

Contoh:

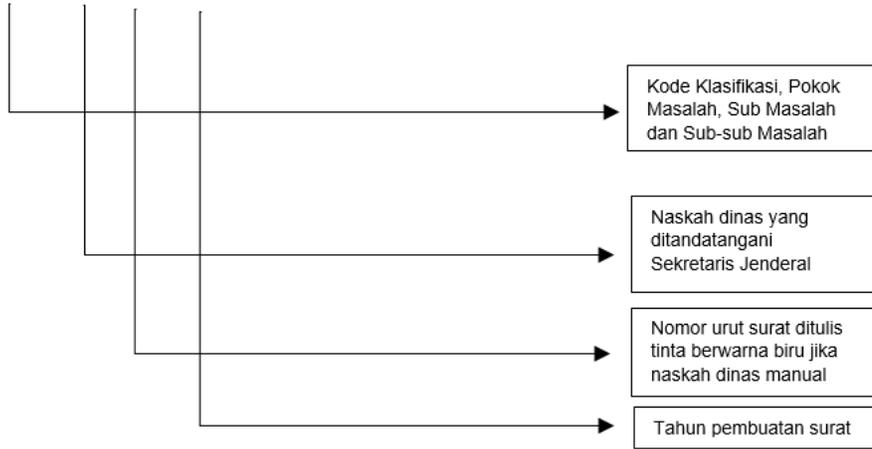
1. Surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan

SS.01.02/Menkes/78/2022



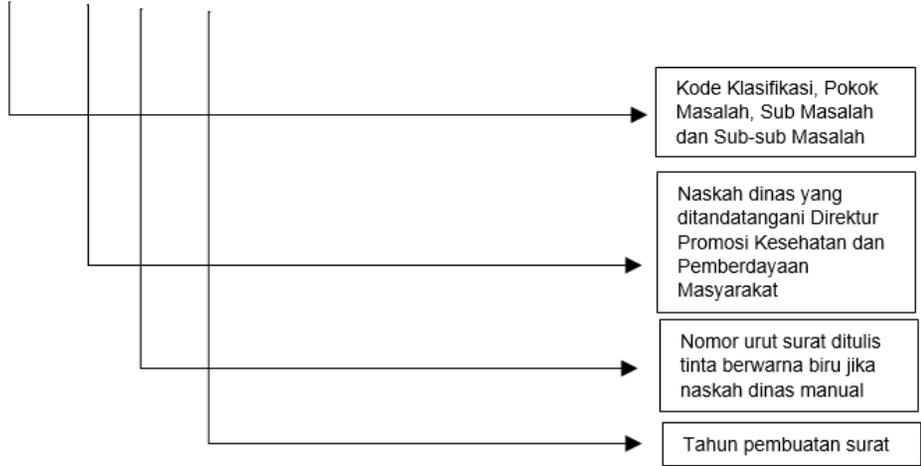
2. Surat dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya (Pejabat Eselon I)

PS.07.03/A/789/2022



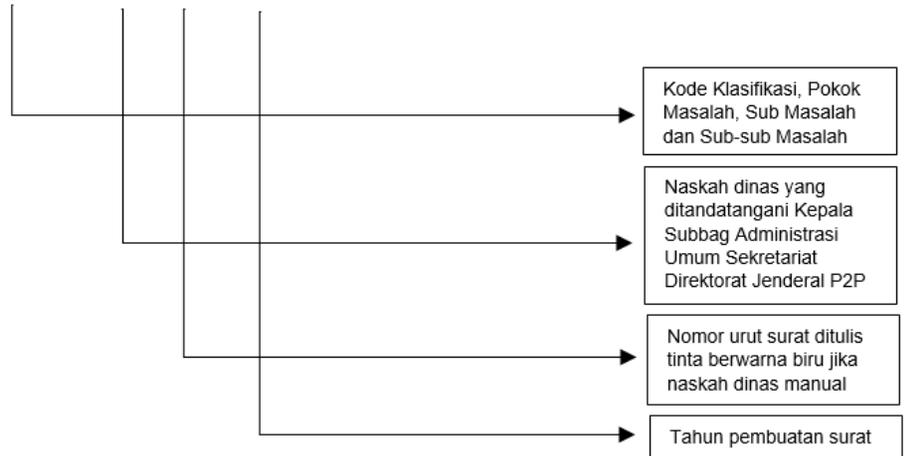
3. Surat dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II)

PK.02.01/B.II/462/2022



4. Nota dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atau Ketua Tim Kerja

AR.02.01/C.I.1/789/2022



FUNGSI FASILITATIF

AR. KEARSIPAN

01. Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis

01.01. Tata Naskah Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan tata naskah dinas meliputi penyusunan, sosialisasi, monitoring, bimbingan, evaluasi, dan penggunaan tata naskah dinas.

01.02. Pola Klasifikasi Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pola klasifikasi arsip meliputi penyusunan, sosialisasi, monitoring, bimbingan, evaluasi dan penggunaan pola klasifikasi arsip

01.03. Jadwal Retensi Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan jadwal retensi arsip meliputi penyusunan, sosialisasi, monitoring, bimbingan, evaluasi dan penggunaan jadwal retensi arsip.

01.04. Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip meliputi penyusunan, sosialisasi, monitoring, bimbingan, evaluasi dan penggunaan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip.

01.05. Pengelolaan Kearsipan Dinamis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pengelolaan kearsipan dinamis meliputi penyusunan, sosialisasi, monitoring, bimbingan, evaluasi dan penggunaan pengelolaan kearsipan dinamis.

02. Penciptaan Arsip

02.01. Pengelolaan Surat Masuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

- 02.02. Pengelolaan Surat Keluar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
- 03. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip
 - 03.01. Pengelolaan Arsip Aktif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan tanda perintah file/simpan, memberi indeks dan klasifikasi pada surat, mencatat pada daftar arsip aktif, memasukkan surat ke folder dan menempatkan di *filing cabinet*.
 - 03.02. Pengelolaan Arsip Inaktif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
 - 03.03. Pengelolaan Arsip Vital
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip vital meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
 - 03.04. Pengelolaan Arsip Terjaga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip terjaga meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
 - 03.05. Pengelolaan Arsip Audio Visual
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip audio visual meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
 - 03.06. Pengelolaan Arsip Elektronik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip elektronik meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.

- 03.07. Alih Media Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip meliputi berita acara alih media arsip, daftar arsip dinamis yang dialihmediakan, dan lain-lain.
- 03.08. Layanan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip yang meliputi peminjaman arsip, pelayanan arsip ditempat/baca di tempat dan penggandaan/fotokopi.
- 03.09. Pemeliharaan Fisik Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan meliputi pemberian kamper, fumigasi dan lain sebagainya.
- 04. Penyusutan
 - 04.01. Pemindahan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip meliputi daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara pemindahan.
 - 04.02. Pemusnahan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip meliputi surat keputusan tim pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan, surat pertimbangan penilaian dari unit pencipta arsip, surat permohonan persetujuan pemusnahan ke Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari ANRI, surat keputusan pemusnahan dan berita acara pemusnahan.
 - 04.03. Penyerahan Arsip Statis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis meliputi akuisisi arsip, daftar arsip yang diserahkan, surat keputusan penyerahan dan berita acara penyerahan.
- 05. Sumber Daya Kearsipan
 - 05.01. Pembinaan Organisasi Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan organisasi kearsipan (unit kearsipan dan unit pengolah) yang meliputi supervisi kearsipan, bimbingan teknis

kearsipan, monitoring dan evaluasi, pengawasan kearsipan, akreditasi kearsipan, lomba unit pengolah dan unit kearsipan.

05.02. Pembinaan SDM Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia kearsipan yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, seminar, organisasi profesi arsiparis, lomba arsiparis teladan dan sertifikasi arsiparis.

05.03. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana meliputi gedung, ruangan dan peralatan kearsipan (*roll o pack*, *filing cabinet*, boks arsip, folder, sekat, dan lain-lain).

BJ. PENGADAAN BARANG DAN JASA

01. Pengadaan Barang dan Jasa

01.01. Tender Seleksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tender/ seleksi meliputi persiapan, penyusunan data tender/ seleksi, undangan *review* paket tender/seleksi, proses pelaksanaan tender/seleksi, evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi.

01.02. Tender Cepat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tender cepat meliputi persiapan, penyusunan data tender cepat, undangan *review* paket tender cepat, proses pelaksanaan tender cepat, evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi.

01.03. Pengadaan Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan langsung meliputi persiapan, penyusunan data pengadaan langsung, undangan *review* paket pengadaan langsung, proses pelaksanaan pengadaan

langsung, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil pengadaan langsung.

01.04. *e-Purchasing*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *e-purchasing* meliputi persiapan, penyusunan data *e-purchasing*, undangan reviu paket *e-purchasing*, proses pelaksanaan *e-purchasing*, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil *e-purchasing*.

02. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

02.01. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan LPSE.

02.02. Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kontrak kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

02.03. Katalog Elektronik Sektoral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

HK. HUKUM

01. Rancangan Peraturan Perundang-undangan

01.01. Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang meliputi naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.

01.02. Rancangan Peraturan Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkannya Rancangan Peraturan Pemerintah.

01.03. Rancangan Peraturan Presiden

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.

01.04. Rancangan Keputusan Presiden

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan.

01.05. Rancangan Instruksi Presiden

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Instruksi Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum ditetapkan.

01.06. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.

01.07. Rancangan Keputusan Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.

01.08. Rancangan Keputusan Bersama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Bersama yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.

02. Rancangan Instruksi/Surat Edaran

02.01. Rancangan Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.

- 02.02. Rancangan Keputusan/Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon I yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
- 02.03. Rancangan Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon II dan kepala unit pelaksana teknis yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum lainnya di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
03. Rancangan Nota Kesepahaman/*Memorandum Of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama
- 03.01. Kerja Sama Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Nota Kesepahaman/*Memorandum Of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama dalam kerja sama dalam negeri yang meliputi antar-instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau badan hukum lainnya.
- 03.02. Kerja Sama Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Nota Kesepahaman/*Memorandum Of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama dalam kerja sama luar negeri yang meliputi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional.
04. Pembinaan Hukum
- 04.01. Sosialisasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, peraturan perundang-undangan dan produk

hukum lain), penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen/produk hukum kepada lembaga atau perorangan.

04.02. Dokumentasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi hukum meliputi penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan penyebaran informasi hukum.

05. Bantuan Hukum

05.01. Bantuan Hukum Kasus Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus pidana meliputi pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.02. Bantuan Hukum Kasus Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus perdata meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.03. Bantuan Hukum Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus tata usaha negara meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.04. Bantuan Hukum Hak Uji Materiil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus hak uji materiil di Mahkamah Agung meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

05.05. Bantuan Hukum *Judicial Review*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus *judicial review* di Mahkamah Konstitusi meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum

dan advokasi di bidang kesehatan, dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

06. Kasus/Sengketa Hukum

06.01. Kasus/Sengketa Hukum Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum pidana meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum, dan opini hukum.

06.02. Kasus/Sengketa Hukum Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum perdata meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.

06.03. Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum tata usaha negara meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.

07. Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan

07.01. Pengawasan Bidang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan bidang kesehatan.

07.02. Penyidikan Bidang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyidikan bidang kesehatan.

08. Kekayaan Intelektual

08.01. Hak Cipta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cipta meliputi pengurusan masalah hak cipta sampai dengan penyelesaian masalah hak cipta.

08.02. Hak Paten (Hak Biasa Dan Hak Sederhana)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak paten (hak biasa dan hak sederhana), pengurusan masalah hak paten sampai dengan penyelesaian masalah hak paten.

- 08.03. Hak Merk
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak merk
pengurusan masalah hak merk sampai dengan
penyelesaian masalah hak merk.

IR. INFORMATIKA

01. Pengembangan Sistem Informasi

- 01.01. Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem
Informasi atau Aplikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pembuatan/pengembangan/pemeliharaan sistem
informasi atau aplikasi.
- 01.02. Standardisasi Sistem Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan standardisasi sistem informasi.
- 01.03. Rancangan Kebijakan Teknis dan Regulasi Layanan Data
dan Produk Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
rancangan kebijakan teknis dan regulasi layanan data
dan produk informasi.

02. Pengelolaan Teknologi Informasi

- 02.01. Pengelolaan Aplikasi dan *Database*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan aplikasi, pengelolaan basis data, pengelolaan
layanan penggunaan (surat elektronik, tanda tangan
elektronik, *video conference*), dan pengelolaan situs web.
- 02.02. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang
meliputi pengelolaan jaringan internet/LAN, *data center*,
piranti teknologi informasi, *server* dan dokumen *hosting*.
- 02.03. Keamanan Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan keamanan informasi.

03. Pengelolaan Data dan Informasi

03.01. Analisis Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan semua kegiatan analisis data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, telaah, penilaian kualitas data, sosialisasi, *workshop*, penyusunan profil kesehatan Indonesia, dokumentasi kunjungan kerja dan informasi data, dan penyajian data pimpinan dan katalog layanan data dan informasi, pemenuhan permintaan layanan data dan informasi.

03.02. Tata Kelola Kesehatan dan Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan semua kegiatan analisis data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, telaah, penilaian kualitas data, sosialisasi, penyusunan profil kesehatan Indonesia, dokumentasi kunjungan kerja dan informasi data.

KH. KEMAHASISWAAN

01. Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa

01.01. Fasilitas Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas mahasiswa yang meliputi kesehatan mahasiswa, transportasi, asrama, sekretariat organisasi mahasiswa, olah raga dan kesenian, bimbingan konseling, pengembangan minat bakat dan fasilitas lainnya.

01.02. Beasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan beasiswa meliputi dengan penetapan penerimaan beasiswa, seleksi calon penerima beasiswa, tawaran beasiswa, dan keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)

02. Organisasi Mahasiswa

02.01. Kegiatan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA)/Himpunan Mahasiswa

Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) yang meliputi proses pembentukan, daftar anggota dan pengangkatan pengurus.

02.02. Pelaksanaan Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan.

03. Kegiatan Mahasiswa

03.01. Kegiatan Akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah dan prestasi yang meliputi lomba mahasiswa lokal/nasional/internasional.

03.02. Kegiatan Non-Akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan non-akademik yang meliputi lomba kegiatan mahasiswa lokal/nasional/internasional.

03.03. Proposal Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proposal kegiatan mahasiswa yang diterima dan yang ditolak.

04. Status Mahasiswa

04.01. Status Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan status mahasiswa yang meliputi pindah program studi, cuti akademik, pengunduran diri, surat pernyataan kembali kuliah, dispensasi tidak mengikuti kuliah, skorsing, sanksi, dan surat keterangan mahasiswa.

KM. KOMUNIKASI PUBLIK

01. Media Masa

01.01. Liputan dan Dokumentasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan liputan dan pendokumentasian yang meliputi proses pengumpulan/pengolahan data dan informasi sebagai bahan publikasi dengan melakukan perekaman baik berupa gambar/foto, suara, buku dan video sebagai gambaran jalannya peristiwa.

- 01.02. Wawancara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan wawancara yang meliputi kegiatan pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebaran hasil wawancara yang mengaitkan antara draf pertanyaan, bahan wawancara, narasumber dengan media sebagai pemohon.
- 01.03. Penyajian Berita dan Konten Media Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian berita dan konten media sosial yang meliputi kegiatan pemaparan/penjelasan data dan informasi sebagai bahan publikasi biasanya disajikan dalam bentuk *press release* dan konten infografis.
- 01.04. Pertemuan Media Massa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertemuan media massa meliputi kegiatan pembahasan isu kesehatan dengan memfasilitasi pertemuan narasumber dengan berbagai media dalam bentuk diskusi atau konferensi pers berdasarkan undangan dari Kementerian Kesehatan.
- 01.05. Kompetisi Komunikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi komunikasi meliputi kegiatan pemberian apresiasi atas atensi khusus dalam bidang kesehatan berupa kompetisi jurnalistik, kompetisi majalah/sejenisnya, kompetisi foto, kompetisi media sosial dan kegiatan sejenisnya.
- 01.06. *Press Tour*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *press tour* meliputi kegiatan kunjungan media nasional yang diprakarsai Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah.
02. Opini Publik
- 02.01. Analisis Opini Publik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis opini publik meliputi kegiatan pemantauan, analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini publik serta

kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan berita kesehatan.

02.02. Strategi Komunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi komunikasi meliputi kegiatan media *visit* dan media *coaching* menteri dan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan.

03. Produksi Komunikasi

03.01. Pembuatan Film atau Video

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan film atau video yang meliputi informasi berupa citra bergerak dan terekam dalam rangkaian fotografik dan suara pada pita magnetik yang penciptaannya menggunakan media teknologi/elektronik.

03.02. Advertorial Cetak dan *Online*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan advertorial cetak dan *online* meliputi pembuatan berita, artikel atau iklan di media cetak dan *online*.

04. Hubungan Antar Lembaga

04.01. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

04.02. Hubungan Antar-Lembaga Non-Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar-lembaga non-pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar lembaga dengan perusahaan/swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/sekolah dan lembaga non-pemerintah lainnya.

04.03. Forum Kehumasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan/badan koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas).

05. Pelayanan Informasi Publik

05.01. Layanan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan informasi meliputi permohonan informasi baik melalui surat maupun telepon, keterbukaan informasi publik, pengaduan masyarakat, pojok informasi, unit layanan terpadu, dan sistem informasi pelayanan publik.

05.02. Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi meliputi kegiatan diseminasi informasi, penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak dan *online*, siaran radio kesehatan dan TV serta pameran foto dan pameran pembangunan kesehatan.

06. Penerbitan Dan Perpustakaan

06.01. Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, produksi dan pendistribusian literatur/informasi sebagai bahan publikasi seperti buletin, majalah dan jurnal.

06.02. Perpustakaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan seperti permintaan nomor *International Standard Book Number* (ISBN), inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, input *database*, penjajaran koleksi, pelayanan perpustakaan seperti literasi informasi, penelusuran referensi, layanan sirkulasi/peminjaman, pengembangan, perawatan/pelestarian bahan dan koleksi perpustakaan serta bimbingan teknis perpustakaan.

KN. KEKAYAAN NEGARA

01. Barang Milik Negara (BMN)

01.01. Perencanaan Kebutuhan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi pengadaan barang

habis pakai, pengadaan barang bergerak, pengadaan barang tidak bergerak/investasi/aset dan pengadaan jasa, perencanaan terkait pemeliharaan BMN, dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

01.02. Penggunaan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan BMN meliputi penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, penggunaan sementara, dioperasikan pihak lain, dan BMN *idle*.

01.03. Pemanfaatan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN meliputi dokumen sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

01.04. Asuransi BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengasuransian BMN, meliputi pembuatan usulan asuransi, persiapan pengadaan jasa asuransi, persiapan pemilihan penyedia jasa asuransi, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan dan penandatanganan kontrak asuransi, BAST polis asuransi, *endorsement*, dan klaim asuransi.

01.05. Penatausahaan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan BMN meliputi aset lancar/persediaan, aset tetap dan aset lainnya, Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Laporan (KIL).

01.06. Inventarisasi BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN meliputi inventarisasi umum/mutasi barang/serah terima aset/berita acara hibah, standardisasi/kodefikasi, pelaporan persediaan dan BMN (tanah, gedung, wisma, rumah dinas, alat teknik, kendaraan dinas, buku pustaka, alat kantor mesin, dan alat kantor bukan mesin).

01.07. Pelaporan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan BMN meliputi laporan unit akuntansi pengguna/unit akuntansi pembantu pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), laporan BMN, laporan persediaan, laporan pengawasan dan pengendalian, laporan rencana kebutuhan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan akuntansi BMN.

01.08. Penghapusan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan berupa standardisasi/petunjuk teknis penghapusan, usulan penghapusan, data dan dokumen pendukung, penilaian dalam rangka penghapusan, penetapan penghapusan, dokumen terkait penyebab penghapusan antara lain dokumen penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain, pemindahtanganan BMN, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, ketentuan peraturan perundang undangan yang harus dilaksanakan, pemusnahan BMN, atau sebab-sebab lain, berita acara pemeriksaan/penelitian, berita acara penghapusan, BAST BMN yang dihibahkan dan naskah hibah BMN.

01.09. Pengelolaan Rumah Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumah negara berupa pendaftaran, penetapan status golongan dan surat izin penghunian rumah negara, BAST kunci rumah negara, teguran kepada penghuni rumah negara, alih fungsi, alih status golongan rumah negara, penghapusan rumah negara, dan perencanaan terkait pemeliharaan rumah negara tidak berpenghuni.

KP. KEPEGAWAIAN

01. Pengadaan Pegawai

01.01. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi *bezetting* dan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus (*insidental*).

01.02. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan PNS meliputi penyelesaian surat keputusan CPNS pelamar umum, penyelesaian surat keputusan CPNS tenaga honorer, peningkatan status CPNS menjadi PNS < 2 (dua) tahun, peningkatan status CPNS menjadi PNS > 2 (dua) tahun, pemanggilan peserta Pelatihan Dasar CPNS, penyelesaian ralat surat keputusan CPNS/PNS melalui BKN, penyelesaian ralat surat keputusan CPNS/PNS tanpa melalui BKN, penyelesaian surat keputusan pemberhentian CPNS atas Permintaan Sendiri (APS), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS dan sumpah PNS.

01.03. Identitas Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan identitas PNS meliputi pengusulan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu), dan pengusulan penetapan Nomor Identitas Pegawai (non-PNS).

01.04. Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai dengan penugasan khusus meliputi surat keputusan pengangkatan penugasan khusus, surat keputusan pengangkatan kembali penugasan khusus, surat keputusan pindah/perubahan kriteria/ralat

penugasan khusus, Surat Keputusan wafat/tewas penugasan khusus, Surat Keputusan berhenti penugasan khusus.

01.05. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan PPPK, surat keputusan pengangkatan, surat keputusan pindah/perubahan kriteria/ralat perjanjian kerja, surat keputusan wafat/tewas perjanjian kerja, surat keputusan berhenti perjanjian kerja.

01.06. Pegawai Perbantuan (Magang, BKO, PKWT)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pegawai Perbantuan, surat keputusan pengangkatan, surat kriteria/ralat perjanjian kerja, surat keputusan berhenti perjanjian kerja.

02. Mutasi Pegawai

02.01. Kenaikan Pangkat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan usulan kenaikan pangkat meliputi kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat luar biasa, pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja.

02.02. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KGB pegawai.

02.03. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.

02.04. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian SKP meliputi penilaian kinerja dan perilaku kerja.

02.05. Dukungan Informasi Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dukungan informasi kepegawaian meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi hasil analisa

jabatan (peta jabatan/informasi jabatan) dan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK).

03. Pengembangan Pegawai

03.01. Pengembangan Karier

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan karier meliputi peningkatan golongan dan pendidikan sesuai kebutuhan organisasi untuk mengikuti ujian dinas, ujian kenaikan pangkat, sumpah jabatan, penyesuaian ijazah, tugas dan izin belajar.

03.02. Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi jabatan fungsional melalui surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional (surat keputusan kenaikan jabatan, pengangkatan pertama, alih jabatan, *inpassing*/penyesuaian), surat keputusan pembebasan sementara, surat keputusan pengangkatan kembali, surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional, surat keputusan pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBCR) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi jabatan fungsional tertentu.

03.03. Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perancangan pengembangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi meliputi penyiapan bahan dalam pengisian jabatan mulai dari jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) dan jabatan administrasi (administrator dan pengawas) serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat.

03.04. Penugasan/Surat Perintah Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai meliputi surat perintah melaksanakan tanggung jawab sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.).

03.05. Manajemen Talenta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem merit dan manajemen talenta.

04. Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

04.01. Penegakan Disiplin Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan disiplin pegawai meliputi pemberhentian sementara sebagai PNS, pemberhentian PNS, hukuman disiplin (tingkat ringan, sedang, dan berat), penetapan status kepegawaian dan pengaduan masyarakat/permasalahan umum.

04.02. Kesejahteraan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan pegawai meliputi izin perkawinan dan perceraian, penyelesaian cuti PNS seperti cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti besar, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), pengajuan, pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Tabungan Perumahan (Taperum) dan keanggotaan pegawai dalam organisasi sosial.

04.03. Penghargaan bagi PNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan PNS meliputi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (10, 20, dan 30 tahun) dari Presiden Republik Indonesia dan tanda penghargaan Bakti Karya Husada (Dwi Windu dan Tri Windu) dari Menteri Kesehatan.

04.04. Penghargaan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan lainnya meliputi surat keputusan dan piagam untuk penghargaan lainnya yang dikelola/koordinir oleh masing-masing unit kerja pemegang program di lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain penghargaan Ksatria Bakti Husada, Manggala Karya Bakti Husada, Mitra Bakti Husada, institusi kesehatan berprestasi, tenaga kesehatan berprestasi, kader lestari, tenaga kesehatan teladan tingkat nasional, pemilihan lomba sekolah sehat tingkat nasional, dosen politeknik kesehatan dan

widyaiswara berprestasi, lomba-lomba dan tanda penghargaan bidang kesehatan lainnya.

04.05. Pemeriksaan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan bagi Menteri dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan, surat keputusan tim penguji kesehatan dan surat pemeriksaan kesehatan pegawai/calon pegawai.

04.06. Tata Usaha Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian meliputi kegiatan presensi pegawai dan monitoring pegawai.

04.07. Organisasi Non-Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non-kedinasan meliputi kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dharma Wanita, koperasi dan yayasan.

KR. KERUMAHTANGGAAN

01. Pelayanan Kerumahtanggaan

01.01. Pelayanan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan kebutuhan prasarana, sarana, dan pengelolaan ruang kerja, pengelolaan ruang pertemuan/rapat/lapangan upacara, peminjaman prasarana dan sarana kantor.

01.02. Pelayanan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada pimpinan, penyediaan petugas kebersihan dan penyediaan petugas pendukung lainnya.

01.03. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pakaian dinas pegawai, satuan pengamanan, tenaga honorer, pramubakti, petugas kebersihan dan petugas pendukung lainnya.

- 01.04. Gerakan Kantor Berhias (GKB)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan GKB.
- 02. Pemeliharaan dan Perbaikan
 - 02.01. Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan pembangunan gedung.
 - 02.02. Pemeliharaan dan Perbaikan rumah dinas/wisma/gudang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan rumah dinas/wisma/gudang, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan izin penggunaan rumah dinas dan izin pembangunan rumah dinas/wisma/gudang.
 - 02.03. Pertamanan/*landscaping*/penghijauan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pertamanan/*landscaping*.
 - 02.04. Peralatan kantor, mesin dan pengolah data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, mesin dan pengolah data.
 - 02.05. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kantor pusat.
- 03. Pengelolaan Jaringan
 - 03.01. Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, pemasangan jaringan telekomunikasi meliputi telepon dan *Base Transceiver Station* (BTS).
 - 03.02. Pengelolaan Jaringan Listrik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan jaringan listrik.
 - 03.03. Pengelolaan Jaringan Air
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan jaringan air.

- 03.04. Pengelolaan TV Kabel
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan TV kabel dan/atau internet.
- 03.05. Pelaksanaan Penghematan Energi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penghematan energi di lingkungan kantor pusat.
- 04. Pengelolaan Kendaraan Dinas
 - 04.01. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan penatausahaan pengelolaan kendaraan dinas.
 - 04.02. Pengelolaan Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan kendaraan dinas, rekomendasi pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas.
 - 04.03. Penggunaan Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas.
- 05. Ketertiban dan Keamanan
 - 05.01. Pengamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat dan tamu pejabat, rumah dinas, prasarana dan sarana kantor yang meliputi, penatausahaan surat izin masuk/keluar BMN dan orang, pendayagunaan petugas pengamanan, petugas jaga/piket, penatausahaan kejadian/ gangguan/ pelanggaran, mobilisasi demonstran dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/TNI dan aparat keamanan lainnya.
 - 05.02. Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan laporan ketertiban dan keamanan meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan dan penertiban penggunaan prasarana dan sarana, serta

hal-hal koordinasi partisipatif lainnya terkait komunikasi dengan lingkungan sekitar.

05.03. Administrasi Pengelolaan Parkir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan dan penyediaan lahan parkir.

KS. KERJA SAMA LUAR NEGERI

01. Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri

01.01. Telaah Permohonan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaah permohonan meliputi persiapan, penyusunan dan pelaksanaan telaah permohonan.

01.02. Dokumen Kerja Sama Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dokumen kerja sama internasional meliputi persiapan serta pelaksanaan dalam penyusunan dokumen seperti *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Letter of International (LoI)* dan *agreement* lainnya.

01.03. Kertas Posisi/Surat Pendelegasian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kertas posisi/surat pendelegasian meliputi persiapan serta pelaksanaan penyusunan kertas posisi/surat pendelegasian.

01.04. Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi pinjaman hibah luar negeri meliputi persiapan serta pelaksanaan penyusunan registrasi pinjaman hibah luar negeri.

02. Penyusunan Program, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Luar Negeri

02.01. Kerja sama Kesehatan Bilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan bilateral meliputi persiapan penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral baik di

kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah maupun kawasan Amerika, Eropa dan Afrika.

02.02. Kerja Sama Kesehatan Regional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan regional meliputi persiapan penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional baik dengan negara *Association South East Asia Nation* (ASEAN) maupun Non-ASEAN.

02.03. Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan multilateral meliputi persiapan penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan multilateral baik dengan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) maupun non-PBB.

03. Administrasi Kerja Sama Luar Negeri

03.01. Administrasi Kerja Sama Antar-Lembaga Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah dan *International Non-Government Organization* (INGO)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kerja sama antar-lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan INGO meliputi persiapan serta pelaksanaan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah dan INGO.

03.02. Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi tenaga kerja asing kesehatan meliputi persiapan dan pelaksanaan administrasi tenaga kerja asing kesehatan.

03.03. Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas luar negeri meliputi izin, Surat Perintah (SP) Sekretariat Negara, paspor, visa dan *exit permit*.

KU. KEUANGAN

01. Tata Laksana Keuangan

01.01. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PNBP meliputi usulan target dan pagu PNBP, dokumen target dan pagu penyusunan PNBP, usulan PNBP/Badan Layanan Umum (BLU), usulan remunerasi BLU, pola tarif, laporan dan berita acara baik BLU maupun non BLU.

01.02. Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa

Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hibah langsung luar negeri barang/jasa meliputi laporan dan hasil pemantauan.

01.03. Penghapusan Piutang

Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan proses penghapusan piutang meliputi persiapan, proses dan pelaksanaan sampai usulan penghapusan piutang.

02. Pelaksanaan Anggaran

02.01. Belanja Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya pemakaman, penggajian pegawai honorer dan vakasi.

02.02. Belanja Barang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang BLU dan belanja bantuan sosial.

02.03. Belanja Modal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja modal meliputi pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya.

02.04. Pengeluaran Anggaran

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran meliputi Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung),

SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahkan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN dan bahan nota keuangan, dan lain-lain.

03. Pengelolaan Perbendaharaan

03.01. Perbendaharaan

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perbendaharaan meliputi persiapan usulan persetujuan dan pelaporan pembukaan dan penutupan rekening, surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

03.02. Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lain.

03.03. Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).

03.04. Penerimaan Non Pajak

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara.

03.05. Pengembalian Belanja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian belanja meliputi pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

- 03.06. Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berita acara pemeriksaan kas.
- 03.07. Verifikasi Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi anggaran meliputi pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran.
- 03.08. Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan anggaran yang meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi.
04. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 04.01. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04.02. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Koordinator Wilayah (pada UPT yang menjadi Koordinator Wilayah)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada koordinator wilayah (UPT yang menjadi koordinator wilayah) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04.03. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I (Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit eselon I

(Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- 04.04. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- 04.05. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja BLU

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.

- 04.06. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Non-BLU

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja non-BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.

- 04.07. Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis akuntansi kementerian.

- 04.08. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja.

- 04.09. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Unit Eselon I

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Unit Eselon I.

- 04.10. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Kementerian Kesehatan.

MR. Manajemen Risiko

01. Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan

01.01. *Risk Register*

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi, penetapan, pelaksanaan dan penyusunan *risk register* manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan.

01.02. Laporan Manajemen Risiko

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

01. Organisasi

01.01. Penataan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penataan organisasi (kantor pusat, unit pelaksana teknis, dan perangkat daerah) meliputi penyusunan naskah akademis, pedoman, dan perumusan organisasi dan tata kerja.

01.02. Evaluasi Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi meliputi penyusunan instrumen dan monitoring evaluasi organisasi.

01.03. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi pelaksanaan koordinasi tugas fungsi lintas program dan lintas sektor.

01.04. Budaya Kerja Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan budaya kerja organisasi.

02. Ketatalaksanaan

02.01. Proses Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses bisnis meliputi identifikasi, analisis, pemetaan dan penetapan bisnis proses dan peta lintas fungsi.

02.02. Standar Operasional Prosedur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar operasional prosedur meliputi penyusunan finalisasi, penetapan, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur.

02.03. Pedoman Ketatalaksanaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman ketatalaksanaan untuk menindaklanjuti organisasi dan tata kerja meliputi penyusunan akronim, singkatan nama, nomenklatur bahasa inggris, dan dokumen pedoman lainnya terkait ketatalaksanaan.

03. Analisis Jabatan

03.01. Informasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan dengan hasil akhir informasi jabatan yang berisikan informasi tentang nama jabatan, uraian jabatan, syarat jabatan, uraian tugas dan fungsi, kewenangan, dan efektifitas dan efisiensi jabatan.

03.02. Analisis Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis beban kerja meliputi perhitungan beban kerja dan penyusunan peta jabatan.

03.03. Evaluasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi jabatan meliputi penentuan harga jabatan dan kelas jabatan.

04. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi

04.01. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi meliputi penyusunan

roadmap dan gambaran pencapaian reformasi birokrasi, dan implementasi transformasi internal meliputi transformasi tata kelola sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, organisasi, kebijakan, dan teknologi dan digital.

04.02. Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang meliputi fasilitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penilaian eksternal oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).

PP. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

01. Penerimaan Mahasiswa baru

01.01. Penerimaan Mahasiswa Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru yang meliputi promosi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), pendaftaran mahasiswa, naskah soal tes, tes masuk, pengumuman hasil tes masuk, uji kesehatan dan wawancara, psikotes, daftar mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, registrasi mahasiswa, daftar mahasiswa yang diterima dan tidak diterima.

01.02. Orientasi Mahasiswa Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan orientasi mahasiswa baru yang meliputi administrasi penyelenggaraan orientasi, sertifikat dan laporan mahasiswa dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

01.03. Mahasiswa Asing

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa asing yang meliputi registrasi, rekomendasi kegiatan pertukaran mahasiswa dan *personal file* mahasiswa asing, izin belajar, keimigrasian, izin tinggal dan laporan keberadaan mahasiswa.

02. Registrasi Mahasiswa

02.01. Registrasi administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi administrasi yang meliputi bukti pembayaran pendidikan.

02.02. Registrasi Akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi akademik yang meliputi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama (reguler dan non-reguler) serta registrasi mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

03. Perkuliahan

03.01. Administrasi Perkuliahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan yang meliputi jadwal perkuliahan (mulai dari pengusulan, penyusunan, dan penetapan), kalender akademik (mulai dari pengusulan, penyusunan, dan penetapan), jadwal akademik, rancangan pengumuman dan rancangan surat edaran (semester genap, semester ganjil, beban mengajar, ruang kuliah, dosen pembina mata kuliah, pembimbing akademik, dan peserta didik).

03.02. Silabus Mata Kuliah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan silabus mata kuliah, bobot Satuan Kredit Semester (SKS), kode mata kuliah (perubahan dan penetapan), persyaratan mata kuliah, bahan bacaan (wajib, pendukung, atau referensi).

03.03. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pembelajaran teori dan pembelajaran praktik (jadwal, materi mata kuliah, kontrak perkuliahan, garis-garis besar materi perkuliahan dan modul bahan ajar).

03.04. Proses Belajar Mengajar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang meliputi permohonan dosen mengajar, tutorial, matrikulasi, pengujian *Objective Structured Clinical*

Assesment (OSCA), pembimbing dan penguji karya tulis ilmiah.

03.05. Daftar Kehadiran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar kehadiran yang meliputi daftar kehadiran dosen, daftar kehadiran mahasiswa dan evaluasi kehadiran.

04. Kurikulum

04.01. Administrasi Kurikulum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kurikulum yang meliputi permohonan pelaksanaan kurikulum, penyusunan kurikulum program studi (penambahan, perubahan dan penyempurnaan kurikulum).

04.02. Pedoman Kurikulum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman kurikulum yang meliputi penyusunan pedoman kurikulum perguruan tinggi dan evaluasi pengembangan kurikulum perguruan tinggi.

04.03. Mata Kuliah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan mata kuliah yang meliputi mata kuliah dasar umum, praktik laboratorium, praktik klinik dan mata kuliah keahlian.

05. Program Studi

05.01. Administrasi Program Studi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi program studi yang meliputi administrasi penyelenggaraan program studi (surat usulan program studi, persetujuan program studi baru, dan penetapan program studi baru).

05.02. Penolakan Program Studi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penolakan program studi.

05.03. Evaluasi Program Studi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program studi termasuk naskah-naskah yang berhubungan dengan proses akreditasi program studi.

06. Dosen

06.01 Pengajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga pendidik yang bertugas mengajar yang meliputi proses belajar mengajar, permohonan dosen mengajar, tutorial, matrikulasi, pengujian ~~objective structured~~ *structured cilinical assessment* (OSCA), pembimbing dan pengujian karya tulis ilmiah dan skripsi, serta laporan realisasi pengajar.

07. Penunjang Akademik

07.01. Administrasi Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan perpustakaan, kegiatan bengkel, kegiatan olahraga, kegiatan praktik lapangan, kegiatan *workshop*, dan kegiatan pendidikan lainnya

07.02. Peraturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan yang meliputi pemakaian laboratorium, pemakaian perpustakaan, pemakaian bengkel, pemakaian prasarana dan sarana olahraga dan pemakaian prasarana dan sarana lainnya.

08. Evaluasi Mahasiswa

08.01. Pelaksanaan Ujian Semester

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester, meliputi usulan, soal, pelaksanaan dan nilai hasil ujian tengah semester dan akhir semester

08.02. Tugas Akhir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas akhir yaitu karya tulis ilmiah, skripsi dan karya tulis akhir profesi, yang meliputi usulan, pelaksanaan, dan nilai tugas akhir (praktik kerja lapangan dan pembelajaran berbagai masalah).

08.03. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan *try-out* dan uji kompetensi yang meliputi usulan, daftar

panitia, penguji dan peserta, soal, pelaksanaan dan nilai hasil uji kompetensi.

09. Yudisium

09.01. Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelulusan mahasiswa yang meliputi penerbitan keputusan kelulusan, surat tugas, undangan, dan prosesi wisuda, berkas pengusulan pengadaan blanko ijazah dan berkas pengadaan transkrip.

09.02. Surat Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kelulusan yang meliputi surat keterangan lulus, surat pengganti ijazah, legalisir ijazah dan sertifikat uji kompetensi.

09.03. Buku Induk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku induk nomor registrasi kelulusan mahasiswa.

10. Alumni

10.01. Himpunan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan himpunan organisasi yang meliputi registrasi alumni dan program kegiatan alumni.

10.02. Perkembangan Alumni

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkembangan alumni dan buku wisuda dan verifikasi ijazah.

PR. PERENCANAAN

01. Perencanaan Strategis dan Program

01.01. Perencanaan Strategis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

01.02. Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato presiden.

- 01.03. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan termasuk laporan kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 01.04. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- 01.05. Usulan Perencanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
- 01.06. Usulan Program Transfer Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan terkait program transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
- 02. Pokok-pokok Kebijakan dan strategi Pembangunan
 - 02.01. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.
 - 02.02. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.
- 03. Rencana Kerja Tahunan
 - 03.01. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Kesehatan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas).
 - 03.02. Penetapan Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti eselon II dengan eselon I,

eselon I dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

04. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
 - 04.01. Penyusunan Anggaran Kementerian Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Kesehatan meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Standar Biaya Umum (SBU), standar Biaya Khusus (SBK).
 - 04.02. Revisi Dokumen Anggaran Kementerian Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi/*refocusing*/efisiensi perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan POK.
 - 04.03. Penyusunan Anggaran Transfer Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
 - 04.04. Revisi Dokumen Anggaran Transfer Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
05. Pelaporan dan Evaluasi
 - 05.01. Laporan Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun meliputi laporan triwulan dan laporan tahun.
 - 05.02. Laporan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan khusus meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti pidato presiden dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

- 05.03. *Progress Report*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu).
- 05.04. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.
- 05.05. Laporan Program Transfer Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.

PS. PENGAWASAN

01. Audit
- 01.01. Audit Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.02. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.03. *Probity Audit*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan *probity audit* yang meliputi surat penugasan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.04. Audit Penugasan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit penugasan khusus yang meliputi surat penugasan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.

02. Reviu

02.01. Reviu Laporan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan (semesteran dan tahunan), meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

02.02. Reviu RKA-KL

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL, revisi RKA-KL/anggaran, buka blokir, *refocusing* anggaran, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

02.03. Reviu Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu lainnya (selain reviu LK dan RKA-KL), antara lain pelaksanaan reviu RKBMN, reviu Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA), Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), aspek kinerja tertentu, aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan hasil kajian pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

03. Evaluasi

03.01. Evaluasi SAKIP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

03.02. Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi JKN meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

03.03. Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi RB di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- 03.04. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 03.05. Evaluasi Efektivitas Kepatuhan SKI/SPI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi efektivitas kepatuhan SKI/SPI meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 03.06. Evaluasi Program Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 04. Pengaduan Masyarakat
 - 04.01. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan melalui berbagai media.
 - 04.02. Daftar Hitam
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar hitam yang datang dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan.
 - 04.03. Klarifikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 05. Laporan Hasil Pengawasan
 - 05.01. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Laporan Hasil Pengawasan BPK Semesteran dan Tahunan yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB dan Menteri Kesehatan.

06. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
 - 06.01. Laporan TP-TGR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap Kerugian Negara yang meliputi TP-TGR seperti, laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, SK Tanggung Jawab Mutlak (Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR).
07. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
 - 07.01. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK/LHP BPKP yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan.
08. Program Pencegahan Korupsi
 - 08.01. Pengendalian Gratifikasi/*Sponsorship*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian gratifikasi/*sponsorship* sampai dengan pelaporan.
 - 08.02. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ZI (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
 - 08.03. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan LHKPN meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
 - 08.04. Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan LHKASN meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
 - 08.05. Program Pencegahan Korupsi Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan program pencegahan korupsi lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan

- 09. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - 09.01. Konsultasi Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
 - 09.02. Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat kerja/koordinasi pengawasan yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber, sampai dengan pelaporan.
 - 09.03. Kebijakan Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan, pedoman pengawasan, petunjuk pelaksanaan pengawasan, petunjuk teknis pengawasan dan lain-lain yang meliputi surat penugasan, nota dinas sampai dengan pelaporan.
 - 09.04. Perencanaan Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), *roadmap* pengawasan yang meliputi penyusunan kegiatan, nota dinas sampai dengan pelaporan.
 - 09.05. Verifikasi Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang bersifat verifikasi.

UM. UMUM

- 01. Kesekretariatan Pimpinan
 - 01.01. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat (Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim), Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas (Rakorpimtas), Rapat Koordinasi Direktorat (Rakordit), Rapat Koordinasi Pusat/Biro, Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam).

- 01.02. Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencetakan dan penggandaan meliputi permintaan fotokopi, penjilidan dan pencetakan.
- 02. Keprotokolan
 - 02.01. Lambang, Bendera dan Lagu Kebangsaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila, bendera kebangsaan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya.
 - 02.02. Pelaksanaan Upacara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara resmi meliputi upacara bendera, upacara hari raya/hari besar nasional, upacara pemakaman dan apel pagi, pelantikan, pengukuhan, pemberian penghargaan, penandatanganan MoU dan peresmian.
 - 02.03. Audiensi dan Jamuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audiensi baik dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan dan penyelenggaraan kegiatan jamuan pimpinan meliputi permohonan, undangan, notulen.
 - 02.04. Agenda Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda pimpinan.
 - 02.05. Ucapan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan meliputi ucapan terima kasih, ucapan selamat dan ucapan belasungkawa.
- 03. Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
 - 03.01. Pembayaran Gaji ASN dan CASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi administrasi pembayaran gaji ASN dan CASN, meliputi naskah/daftar gaji dan penyampaian dokumen mutasi kepegawaian yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan melekat seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,

- Pindah, Pengangkatan dalam Jabatan, Pensiun, dan lain-lain.
- 03.02. Tunjangan ASN dan CASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi usulan pembayaran, meliputi dokumen usulan Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan Kinerja ASN dan CASN.
 - 03.03. Pemotongan Pajak ASN dan CASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi mekanisme pemotongan pajak ASN dan CASN.
 - 03.04. Rekening Gaji ASN dan CASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi pembuatan rekening ASN dan CASN.
 - 03.05. Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan ASN dan CASN meliputi pemotongan iuran.
 - 03.06. Penggunaan Aplikasi e-Monev
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-Monev.
04. Pengelolaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian (TKDP)
- 04.01. Administrasi Pengelolaan Pembayaran Insentif TKDP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi administrasi pembayaran insentif TKDP meliputi Staf Khusus Menteri, tenaga Pegawai Tidak Tetap, tenaga honorer, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Tim, Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Residen dan Dokter Pasca Internsip.
 - 04.02. Tunjangan Uang Lembur TKDP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi usulan uang lembur tenaga Honorer
 - 04.03. Pemotongan Pajak TKDP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi mekanisme pemotongan pajak TKDP.
 - 04.04. Rekening Gaji TKDP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi pembuatan buku rekening TKDP.

- 04.05. Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKDP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi dan pemrosesan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan meliputi pemotongan iuran bulanan kepesertaan.

FUNGSI SUBSTANTIF

AD. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

01. Analisis Lingkungan Strategis

01.01. Analisis Politik Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan dan kebijakan politik kesehatan.

01.02. Analisis Sosial Ekonomi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan dan analisis kebijakan sosial ekonomi.

01.03. Analisis Perilaku

Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan, revolusi mental bidang kesehatan dan *Excecutive Brain Assesment* (EBA) untuk penyusunan analisis perilaku.

01.04. Analisis Kesehatan Intelegensia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan, penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan dan pembahasan analisis kesehatan intelegensia.

02. Pelaksanaan Program

02.01. Analisis Politik Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis politik kesehatan di daerah, lokakarya analisis politik kesehatan dan kegiatan analisis politik kesehatan.

- 02.02. Analisis Sosial Ekonomi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi di daerah, lokakarya analisis sosial ekonomi dan kegiatan analisis sosial ekonomi.
- 02.03. Analisis Perilaku
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis perilaku kesehatan di daerah, lokakarya analisis perilaku kesehatan dan kegiatan analisis perilaku kesehatan.
- 02.04. Analisis Kesehatan Intelegensia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis kesehatan intelegensia di daerah, lokakarya analisis kesehatan intelegensia dan kegiatan analisis kesehatan intelegensia.
- 03. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 03.01. Analisis Politik Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis politik kesehatan.
 - 03.02. Analisis Sosial Ekonomi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan.
 - 03.03. Analisis Perilaku
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis perilaku kesehatan.
 - 03.04. Analisis Kesehatan Intelegensia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan analisis kesehatan intelgensia.

BP. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

01. Penyusunan Kebijakan Teknis Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 01.01. Kebijakan Upaya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
 - 01.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kebijakan kesehatan di bidang ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
 - 01.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.
 - 01.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.
02. Pelaksanaan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan
 - 02.01. Kebijakan Upaya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
 - 02.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
 - 02.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.

- 02.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.
- 03. Pelaksanaan Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan
 - 03.01. Kebijakan Upaya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
 - 03.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
 - 03.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.
 - 03.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.
- 04. Pelaksanaan Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan
 - 04.01. Kebijakan Upaya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
 - 04.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

- 04.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.
- 04.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.
- 05. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan
 - 05.01. Kebijakan Upaya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
 - 05.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
 - 05.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.
 - 05.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.

DP. PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN

- 01. Fasilitasi produksi dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan
 - 01.01. Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program bantuan biaya pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis yang meliputi rekrutmen peserta, penajakan kerja sama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan

- teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.02. Program Bantuan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.03. Program Afirmasi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program afirmasi pendidikan untuk dokter dan dokter gigi yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian/penempatan peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.04. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program afirmasi pendidikan untuk tenaga kesehatan yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian/penempatan peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.05. Penyiapan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kajian pembukaan atau penutupan prodi pendidikan bidang kesehatan, penetapan kuota mahasiswa pendidikan tinggi bidang kesehatan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
0106. Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di tingkat pusat.

- 01.07. Program pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter melalui pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program *Academic Health System* (AHS) dan Dokter Layanan Primer dalam rangka pemenuhan tenaga dokter di pelayanan kesehatan meliputi penyusunan NSPK, sosialisasi, pembuatan *roadmap* implementasi, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan *stakeholders*.
02. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)
- 02.01. Penyelenggaraan Penyelarasan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan IDUKA
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan integrasi fungsional penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan pengguna (*stakeholder*), kerjasama pendidikan tinggi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan dan IDUKA, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 02.02. Penyiapan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau IDUKA
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemagangan dosen atau tenaga kependidikan di fasilitas pelayanan kesehatan atau lokasi lain yang dibutuhkan dalam penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan atau IDUKA, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
03. Penyiapan Cadangan Tenaga Kesehatan dalam Situasi Khusus
- 03.01. Penyiapan Tenaga Kesehatan Cadangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan identifikasi, pendaftaran atau registrasi tenaga kesehatan cadangan.
- 03.02. Mobilisasi Tenaga Kesehatan Cadangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mobilisasi tenaga kesehatan cadangan.

- 03.03. Pembinaan Tenaga Kesehatan Cadangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan tenaga kesehatan cadangan meliputi bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan hal lainnya yang diperlukan.
04. Fasilitasi Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Milik Kementerian Kesehatan Terkait Bidang Penyediaan Tenaga Kesehatan
- 04.01. Penyelenggaraan Pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan fasilitasi penyusunan kurikulum, bahan ajar, pengembangan metode pembelajaran, pelaksanaan program kerja sama detasering, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta hal lainnya terkait penyelenggaraan pendidikan.
- 04.02. Pengembangan Pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan antara lain pengembangan program studi, rintisan kelas internasional, Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), *Center of Excellence (CoE)*, *Inter-Professional Education (IPE)*, *Inter-Professional Collaboration (IPC)*, *Recognize Prior Learning (RPL)* dan lainnya.
- 04.03. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tingkat Pusat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat pusat.
- 04.04. Peningkatan Kapasitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemilihan dosen/mahasiswa berprestasi dan peningkatan kapasitas mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
05. Fasilitasi Penjaminan Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
- 05.01. Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penyusunan atau pengembangan standar-standar

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan termasuk prasarana dan sarana.

- 05.02. Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sinkronisasi pangkalan data pendidikan tinggi, *tracer study*, pembinaan sistem penjaminan mutu, dan akreditasi.
- 05.03. Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi uji kompetensi pendidikan tinggi bidang kesehatan tingkat pusat, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 06. Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
 - 06.01. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan pengelolaan angka kredit, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional bidang pendidikan tinggi tenaga kesehatan.

FH. KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

- 01. Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri
 - 01.01. Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku dan sediaan fitofarmaka dalam negeri.
 - 01.02. Bahan Baku dan Sediaan Produk Biologi Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku dan sediaan produk biologi dalam negeri.
 - 01.03. Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi bahan baku dan sediaan fitofarmaka dan produk biologi dalam negeri.

02. Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri
 - 02.01. Bahan Baku Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku dalam negeri.
 - 02.02. Sediaan Vaksin Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan vaksin dalam negeri.
 - 02.03. Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi bahan baku dan sediaan vaksin dalam negeri.
03. Alat Kesehatan Diagnostik *In-Vitro* Dalam Negeri
 - 03.01. Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat kesehatan.
 - 03.02. Alat Kesehatan Diagnostik *In-Vitro* Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dalam negeri.
 - 03.03. Uji Klinik Alat Kesehatan Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan uji klinik alat kesehatan dalam negeri.
 - 03.04. Pemantauan dan Evaluasi Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi alat kesehatan.
04. Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri
 - 04.01. Sediaan Farmasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan farmasi.
 - 04.02. Bahan Baku Obat Kimia Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku obat kimia dalam negeri.
 - 04.03. Obat Kimia Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan obat kimia dalam negeri.

- 04.04. Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi bahan baku obat kimia dan obat kimia dalam negeri.
- 05. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri
 - 05.01. TKDN Alat Kesehatan Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan TKDN alat kesehatan dalam negeri.
 - 05.02. Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri.
 - 05.03. Pemantauan dan Evaluasi TKDN Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi TKDN alat kesehatan dan penggunaan alat kesehatan dalam negeri.

FK. PENGAWASAN ALAT KESEHATAN

- 01. Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Produksi
 - 01.01. Audit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit CPAKB sarana produksi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
 - 01.02. Audit Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Baik (CPPKRTBC)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit CPPKRTBC sarana produksi PKRT.
 - 01.03. Verifikasi sertifikasi CPAKB
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses verifikasi sertifikasi CPAKB.
 - 01.04. Verifikasi sertifikasi CPPKRTBC
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses verifikasi sertifikasi CPPKRTBC.

- 01.05. Pengawasan *Post-Market* Sarana Produksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan sarana produksi alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan PKRT.
- 02. Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi
 - 02.01. Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
Naskah-naskah yang berkaitan audit CDAKB sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
 - 02.02. Verifikasi sertifikasi CDAKB
Naskah-naskah yang berkaitan proses verifikasi sertifikasi CDAKB.
 - 01.03. Pengawasan *Post-Market* Sarana Distribusi
Naskah-naskah yang berkaitan pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 03. Pengawasan Produk
 - 03.01. Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan alat kesehatan.
 - 03.02. PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan PKRT.
 - 03.03. Pengawasan Iklan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan iklan.
 - 03.04. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan KTD.
 - 03.05. Pengawasan *Vigilans*
Naskah-naskah yang berkaitan pengawasan *vigilans* alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 04. Pembakuan dan Pengujian
 - 04.01. Standar Pengawasan Produk
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan PKRT.

- 04.02. Standar Nasional Indonesia (SNI)
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan rancangan SNI alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 04.03. Standar Pengawasan Sarana Produksi
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan sarana produksi alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan PKRT.
- 04.04. Standar Pengawasan Sarana Distribusi
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 04.05. Standar Sistem Manajemen Mutu
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar sistem manajemen mutu alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan PKRT.
- 05. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 05.01. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyidikan
Naskah-naskah yang berkaitan tindak lanjut hasil pengawasan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan PKRT, dan/atau penyidikan dugaan pelanggaran bidang alat kesehatan.
 - 05.02. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan penanganan keluhan masyarakat terkait produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar, sertifikasi, sarana produksi, dan sarana distribusi.
 - 05.03. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan KIE untuk penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang benar sebagai pemberdayaan masyarakat.
 - 05.04. Sistem Informasi Penyidikan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan pengelolaan sistem informasi penyidikan dan penanganan pengaduan masyarakat.

FP. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

01. Sertifikasi dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi
 - 01.01. Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi kefarmasian di bidang obat.
 - 01.02. Izin Pedagang Besar Farmasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin pedagang besar farmasi.
 - 01.03. Izin Industri Farmasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin industri farmasi.
02. Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar obat
 - 02.01. Harga Obat Katalog
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat katalog.
 - 02.02. Harga Obat Generik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat generik.
 - 02.03. Harga Obat Program Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat program khusus.
 - 02.04. Pasar Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar obat meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.
 - 02.05. Pasar Perbekalan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar perbekalan kesehatan meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.
 - 02.06. E-Logistik Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-logistik obat meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.
 - 02.07. E-Monev Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-monev obat meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.

03. Penilaian Farmakoekonomi
 - 03.01. Kebijakan di bidang Farmakoekonomi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan farmakoekonomi.
 - 03.02. Peningkatan Kapasitas SDM bidang Farmakoekonomi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang farmakoekonomi.
 - 03.03. Implementasi Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi analisis farmakoekonomi di fasilitas pelayanan kesehatan.
04. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan *Special Access Scheme*
 - 04.01. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Narkotika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat narkotika.
 - 04.02. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Psikotropika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat psikotropika.
 - 04.03. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Prekursor Farmasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat prekursor farmasi.
 - 04.04. Perizinan di bidang Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan di bidang obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.
05. Seleksi Fitofarmaka dan Pembinaan Industri dan Usaha Obat Tradisional
 - 05.01. Produksi dan Distribusi Industri di bidang Obat Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi industri di bidang obat tradisional.
 - 05.02. Produksi dan Distribusi Industri di bidang Kosmetika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi industri di bidang kosmetika.

FR. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

01. Penyusunan Standardisasi

- 01.01. Standardisasi Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi alat kesehatan.
- 01.02. Standardisasi Produk Diagnostik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi produk diagnostik.
- 01.03. Standardisasi Produk PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi produk PKRT.
- 01.04. Standardisasi Pengembangan Produk Mandiri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi pengembangan produk mandiri.
- 01.05. Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harmonisasi regulasi alat kesehatan.
- 01.06. Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasukan alat kesehatan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*).

02. Klarifikasi

- 02.01. Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT.
- 02.02. *Double* Keagenan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *Double* Keagenan.

03. Perizinan

- 03.01. Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin edar alat kesehatan dan PKRT.
- 03.02. Surat keterangan Alat Kesehatan dan PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat keterangan alat kesehatan dan PKRT.

- 03.03. Rekomendasi Persetujuan Impor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekomendasi persetujuan impor.
- 03.04. Persetujuan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan iklan alat kesehatan dan PKRT.
- 03.05. Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan pemasukan alat kesehatan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*).
- 03.06. Izin Distribusi Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Izin Distribusi Alat kesehatan.

FY. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

01. Seleksi Obat

- 01.01. Formularium Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium nasional.
- 01.02. Formularium Haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium haji.
- 01.03. Daftar Obat Esensial Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan daftar obat esensial nasional.
- 01.04. Bimbingan Teknis dan Supervisi Penggunaan Formularium Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan penggunaan daftar obat esensial nasional, obat program JKN dan obat untuk pelayanan kesehatan jemaah haji.
- 01.05. Laporan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, laporan dan evaluasi terkait penggunaan daftar obat esensial nasional, obat program JKN, dan obat untuk pelayanan kesehatan jemaah haji.

02. Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*
 - 02.01. Perencanaan kebutuhan Obat Perbekalan Kesehatan dan Vaksin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan obat perbekalan kesehatan dan vaksin untuk program JKN dan haji.
 - 02.02. Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perencanaan kebutuhan obat dan *digital inventory*.
 - 02.03. Bimbingan Teknis dan Supervisi Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan kebutuhan obat dan *digital inventory*.
 - 02.04. Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi perencanaan kebutuhan obat dan *digital inventory* meliputi perencanaan, prosedur dan pemantauan.
 - 02.05. Laporan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan obat dan vaksin esensial di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Puskesmas.
03. Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah
 - 03.01. Tata Kelola Obat *Buffer Stock* Provinsi dan Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola obat *buffer stock* provinsi dan nasional.
 - 03.02. Tata Kelola Obat Program dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola obat program dan pelayanan kesehatan dasar.
 - 03.03. Kebijakan Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, NSPK pengelolaan instalasi farmasi pemerintah.

- 03.04. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan instalasi farmasi pemerintah.
04. Pengendalian Ketersediaan Vaksin
- 04.01. Vaksin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan vaksin meliputi vaksin baru, vaksin reguler, vaksin hepatitis, vaksin influenza dan vaksin haji/umroh.
- 04.02. *Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan ADS dan *Safety Box*.
- 04.03. Reagen
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan reagen meliputi reagen *screening* darah dan reagen campak.
- 04.04. Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Vaksin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, NSPK pengendalian ketersediaan vaksin.
- 04.05. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengendalian Ketersediaan Vaksin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian ketersediaan vaksin.
- 04.06. Laporan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.
05. Pengendalian Ketersediaan Obat
- 05.01. Obat Program Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan obat program kesehatan meliputi obat *buffer stock* pusat, bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), obat penyakit menular, obat filariasis, obat *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* dan Penyakit Menular Seksual (PMS), obat malaria, obat *Tuberculosis (TBC)* paru, obat dan

- perbekalan kesehatan haji, obat kesehatan ibu, obat kesehatan anak, obat gizi, obat kesehatan jiwa, obat Poliklinik Kementerian Kesehatan, obat Operasi Surya Baskara Jaya dan obat hepatitis.
- 05.02. Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, NSPK pengendalian ketersediaan obat.
- 05.03. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengendalian Ketersediaan Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian ketersediaan obat.
- 05.04. Laporan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan obat program di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.
06. Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis
- 06.01. Kebijakan Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, NSPK farmasi manajemen dan farmasi klinis.
- 06.02. Bimbingan Teknis dan Supervisi Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi farmasi manajemen dan farmasi klinis di pelayanan kesehatan dasar.
- 06.03. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan PSEF dan pengelolaan aplikasi perizinan PSEF.
- 06.04. Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi pelayanan kefarmasian meliputi manajemen data, pemantauan, pembinaan dan pengawasan fasilitas kefarmasian melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (SIMONA).

- 06.05. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan *center of excellence* pelayanan kefarmasian.
- 06.06. Laporan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan dan evaluasi di bidang farmasi manajemen dan farmasi klinis.
- 07. Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
 - 07.01. Kebijakan Pengendalian dan penggunaan Obat Rasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, NSPK di bidang pengendalian penggunaan obat rasional.
 - 07.02. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengendalian dan penggunaan Obat Rasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian dan penggunaan obat rasional.
 - 07.03. Promosi dan Edukasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Informasi, Edukasi dan Pelaporan Pelaksanaan Promosi dan Edukasi Masyarakat Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) melalui Sistem Informasi GeMa CerMat (SIGECE).
 - 07.04. Pemantauan dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan, pemantauan dan evaluasi obat esensial untuk penanganan penyakit prioritas.

GM. GIZI MASYARAKAT

- 01. Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi
 - 01.01. Pedoman Gizi Seimbang
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman gizi seimbang.
 - 01.02. Pemberian Makanan Bayi dan Anak
Naskah-naskah yang berisi tentang pemberian makanan bayi dan anak, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

- 01.03. Hari Gizi Nasional
Naskah-naskah yang berisi tentang hari gizi nasional.
- 01.04. Pelayanan Gizi Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang pelayanan gizi masyarakat.
- 02. Kewaspadaan Gizi
 - 02.01. Standar Antropometri
Naskah-naskah yang berisi tentang standar antropometri.
 - 02.02. Pemantauan Konsumsi Gizi
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan konsumsi gizi.
 - 02.03. Gizi dalam Kegiatan Bencana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan gizi dalam kegiatan bencana.
 - 02.04. Pemantauan Status Gizi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan status gizi.
 - 02.05. Jaringan Informasi Pangan dan Gizi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jaringan informasi pangan dan gizi.
- 03. Penanggulangan Masalah Gizi
 - 03.01. *Stunting*/pendek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan gizi *stunting*/pendek.
 - 03.02. Manajemen Taburia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan manajemen taburia dalam penanggulangan masalah gizi.
 - 03.03. Suplementasi Gizi Tablet Tambah Darah dan Vitamin A.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan suplementasi gizi tablet tambah darah dan Vitamin A dalam bidang penanggulangan masalah gizi.
 - 03.04. *Buffer Stock* Makanan Pendamping
Naskah-naskah yang berkaitan *buffer stock* MPASI, Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil dan Anak Sekolah dalam penanggulangan masalah gizi.

04. Pengelolaan Konsumsi Gizi

04.01. Pelayanan Gizi di Puskesmas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi di puskesmas dalam pengelolaan konsumsi gizi.

04.02. Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (RS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi di RS dalam pengelolaan konsumsi gizi.

04.03. Pekan ASI Sedunia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan ASI sedunia dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi.

04.04. Gizi Buruk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan gizi buruk dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi.

HJ. KESEHATAN HAJI

01. Pelayanan Kesehatan Haji

01.01. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.

01.02. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan haji, meliputi penyiapan obat, vaksin dan alat kesehatan serta penyusunan rencana operasional, kontngensi dan mitigasi kesehatan.

01.03. Pelatihan Petugas Kesehatan Haji

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan kompetensi dan integrasi petugas meliputi Tenaga Kesehatan Haji (TKH), Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH), Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

02. Surveilans Kesehatan Haji

02.01. Surveilans Kesehatan Haji

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan haji.

02.02. Analisis Data Kesehatan Haji

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan analisis data kesehatan jemaah haji dan penyusunan profil kesehatan haji.

03. Strategi Pengembangan Kesehatan Haji
 - 03.01. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan rekomendasi kebijakan kesehatan haji.
 - 03.02. Kebijakan Kesehatan haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan/pedoman, petunjuk teknis/standar kesehatan haji serta pengembangan kurikulum dan modul pelatihan petugas kesehatan haji.
04. Pengendalian Risiko dan Promosi Kesehatan Haji
 - 04.01. Program Manasik Kesehatan Haji
Naskah-naskah yang berisiko dengan program manasik kesehatan haji.
 - 04.02. Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti pembuatan media promosi kesehatan dan pembimbingan kesehatan haji dalam peningkatan kebugaran kesehatan haji.
 - 04.03. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian faktor risiko kesehatan haji meliputi pemeriksaan jasa boga catering jemaah haji, vaksinasi jamaah haji dan sanitasi asrama haji.
05. Sistem Informasi dan Publikasi
 - 05.01. Informasi dan Publikasi Kesehatan haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES), telejemaah, telepetugas, DAFTARIN, *website* dan media massa serta penyiapan bahan presentasi pimpinan.
 - 05.02. Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen petugas kesehatan haji meliputi TKH, PPIH, TPK.

IM. IMUNISASI

01. Imunisasi Dasar dan Bayi di Bawah 2 (Dua) Tahun (Baduta)

- 01.01. Imunisasi Hepatitis B0 (HB0), *Bacillus Calmette–Guérin* (BCG), Polio (*Oral Polio Vaccine* (OPV) dan *Inactivated Polio Vaccine* (IPV)), Dipteri Pertusis Tetanus (DPT)-Hepatitis B (HB)- *Haemophilus Influenzae* type B (HiB), MR, JE pada Bayi dan Baduta.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi HB0, BCG, Polio (OPV dan IPV), DPT-HB-Hib, MR, JE pada bayi dan Baduta.

- 01.02. Pekan Imunisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan imunisasi baik nasional maupun internasional.

- 01.03. Data Imunisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data imunisasi.

02. Imunisasi Tambahan dan Khusus

- 02.01. Imunisasi Tambahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi tambahan.

- 02.02. Imunisasi Antigen Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi antigen baru.

- 02.03. Imunisasi Respons KLB

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi respons KLB Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

- 02.04. Imunisasi Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi khusus, contohnya *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) dan Imunisasi untuk Jemaah Haji/Umroh.

03. Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS), Surveilans PD3I dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

- 03.01. Imunisasi WUS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi WUS.

- 03.02. Surveilans PD3I
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans PD3I seperti polio, hepatitis b, pertusis, difteri, haemophilus influenza, campak dan tetanus.
- 03.03. Surveilans KIPI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan surveilans KIPI.
- 04. Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi
 - 04.01. Imunisasi Anak Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi bagi anak usia sekolah.
 - 04.02. Sumber Daya Manusia Imunisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya imunisasi.
 - 04.03. Logistik Imunisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan dan distribusi logistik imunisasi.
 - 04.04. Sistem Informasi Imunisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi imunisasi.
 - 04.05. Koordinasi Lintas Sektor (LS) dan Lintas Program (LP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan LS dan LP

JP. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

- 01. Pembiayaan
 - 01.01. *National Health Account (NHA)/Provincial Health Account (PHA)/District Health Account(DHA)*
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan NHA/PHA/DHA berupa persiapan, pelaksanaan, pendampingan bagi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, laporan, diseminasi pada unit terkait, dan rekomendasi.
 - 01.02. Analisis Biaya Kesehatan
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan biaya pelayanan kesehatan (*costing*), perhitungan kebutuhan satuan biaya kesehatan perorangan dan masyarakat, berupa persiapan, pelaksanaan, laporan, advokasi, dan rekomendasi.

02. Jaminan Kesehatan

02.01. Kepesertaan

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi perhitungan data kepesertaan, penataan kepesertaan, rekonsiliasi dengan kementerian terkait, laporan dan rekomendasi.

02.02. Iuran

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan, kesinambungan, dan kecukupan iuran, laporan serta rekomendasi.

02.03. Tarif

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan tarif yaitu kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), *Indonesian Case Based Groups* (INA CBG) bagi RS, pengembangan dan monitoring tarif, evaluasi klaim RS, penyusunan kebijakan tentang iuran biaya, laporan hasil dan rekomendasi (kebijakan), penetapan tarif (kapitasi dan INA CBG)

02.04. *Clinical Advisory*

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan persiapan pertimbangan medis pelayanan JKN, pelaksanaan, pedoman, komite pelayanan medik, laporan, diseminasi, dan rekomendasi.

02.05. Manfaat Pelayanan

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi paket manfaat, koordinasi kendali mutu dan biaya dengan *stakeholder*, koordinasi dan fasilitasi kegiatan *Coordination of Benefit* (COB) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, laporan, dan rekomendasi.

02.06. Laporan Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Jaminan Kesehatan.

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan laporan pelaksanaan pembayaran tagihan Jaminan Kesehatan.

03. Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan

03.01. Penilaian Teknologi Kesehatan/*Health Technology Assessment* (PTK/HTA)

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan PTK/HTA berupa persiapan pemilihan topik, pelaksanaan HTA, *workshop* hasil dengan tim *ad-hoc* dan para ahli, laporan, diseminasi, dan rekomendasi.

03.02. Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana skrining (deteksi awal) penyakit tidak menular pada peserta JKN, laporan, dan rekomendasi.

KG. KESEHATAN KELUARGA

01. Kesehatan Maternal dan Neonatal

01.01. Pelayanan Antenatal Terpadu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi, deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan, penyiapan persalinan yang bersih dan aman, antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan, penatalaksanaan kasus serta rujukan, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.

01.02. Pelayanan Kelas Ibu Hamil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kelas ibu hamil dalam bentuk tatap muka dan aktivitas fisik/senam ibu hamil.

01.03. Pencegahan Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan primer pada perempuan usia reproduksi agar tidak tertular HIV, Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan pengidap HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya, pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak

dan keluarganya, sasaran semua ibu hamil risiko tertular HIV, ibu hamil dengan HIV dan bayi lahir dari ibu HIV.

- 01.04. Kemitraan Bidan dan Dukun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan bidan dan dukun.
- 01.05. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan, sasaran ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
- 01.06. Supervisi Fasilitatif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan klinis dan manajemen secara terarah dan sistematis untuk pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), bidan koordinator dan bidan desa.
- 01.07. Audit Maternal Perinatal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran dan pengkajian penyebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal.
- 01.08. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, perencanaan penggunaan KB pasca persalinan, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

- 01.09. Tanda Bahaya pada Kehamilan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas.
- 01.10. Surveilans Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi masalah gizi, kesehatan Ibu dan Anak, mengkaji faktor-faktor penyebab masalah, menganalisis dan menginterpretasi informasi yang terkumpul, dan bertindak sesuai hasil yang ada untuk mengurangi masalah gizi, kesehatan ibu dan anak di masa mendatang, menetapkan tingkatan dan kecenderungan, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor penentu (*determinant factors*), mendeteksi kelompok berisiko (*red flags*), memonitor perilaku dan pelayanan kesehatan, memudahkan dalam perencanaan, mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan riset, serta memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program.
- 01.11. Pelayanan Kesehatan Neonatal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
- 01.12. Manajemen Asfiksia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen asfiksia pada Bayi Baru Lahir (BBL), tata laksana yang diberikan pada kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir/beberapa saat setelah lahir.
- 01.13. Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana medik yang diberikan kepada bayi yang lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan.
- 01.14. Pencegahan Infeksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan terjadinya risiko penularan infeksi mikroorganisme dari lingkungan klien dan tenaga

- kesehatan, sasaran tenaga kesehatan, pasien, semua pihak yang berkontak dengan sumber infeksi.
- 01.15. Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- 01.16. *Screening Hypotheroid Congenital*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tes yang dilakukan pada saat bayi berumur beberapa hari untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid kongenital dari bayi yang tidak menderita hipotiroid kongenital.
- 01.17. Kelainan Bawaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan deteksi dini kelainan bawaan pada janin dan bayi baru lahir.
02. Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah
- 02.01. Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan SDIDTK yang dilakukan menggunakan Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) meliputi motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, Tes Daya Dengar (TDD), Tes Daya Lihat (TDL).
- 02.02. Rujukan Tumbuh Kembang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan sistem rujukan tumbuh kembang dengan melatih tim rujukan tumbuh kembang di RS rujukan regional provinsi yang mampu melakukan intervensi gangguan tumbuh kembang sesuai level pelayanan.
- 02.03. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (*The Implementation of the Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) Computerized Adaptation and Training Tools (ICATT)*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berbasis komputer.
- 02.04. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendekatan terintegrasi/terpadu dalam tata laksana

balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak berusia 0-59 bulan secara menyeluruh di unit rawat jalan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

- 02.05. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat.
- 02.06. Buku Kesehatan Ibu dan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.
- 02.07. Kohort Bayi, Kohort Anak Balita dan Anak Pra-Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kohort bayi, kohort anak balita dan anak pra-sekolah (instrumen yang digunakan untuk register perekaman data hasil pemeriksaan kesehatan bayi (0-11 bulan) dan anak balita dan pra-sekolah (12-72 bulan) yang tercatat pada kartu balita).
- 02.08. Anak dengan Disabilitas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 02.09. *Knowledge Sharing Program (KSP)*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan KSP meliputi studi komparasi pemanfaatan buku KIA di beberapa negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan Indonesia.
- 02.10. Kelas Ibu Balita
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelas ibu balita dalam bentuk tatap muka yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemberian ASI eksklusif, pengetahuan ibu akan pentingnya imunisasi, keterampilan ibu dalam pemberian MP-ASI dan gizi seimbang, kemampuan ibu memantau pertumbuhan dan

melaksanakan stimulasi perkembangan, pengetahuan ibu cara merawat gigi dan cuci tangan yang benar serta meningkatkan pengetahuan ibu tentang penyakit terbanyak serta cara pencegahan dan perawatannya.

03. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

03.01. Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar nasional PKPR.

03.02. Akselarasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akselarasi pelaksanaan UKS.

03.03. Kader Kesehatan Remaja/Konselor Sebaya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kader kesehatan remaja/konselor sebaya.

03.04. PKPR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan PKPR.

03.05. Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, termasuk penjangkaran (pemeriksaan kesehatan dan *screening* anemia) serta pemberian tablet tambah darah.

03.06. Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

03.07. Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan partisipasi anak usia sekolah dan remaja.

03.08. Jejaring Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan jejaring kesehatan usia sekolah dan remaja.

04. Kesehatan Reproduksi

04.01. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

- 04.02. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi PUS/Skrining Layak Hamil
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi PUS/skrining layak hamil.
- 04.03. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Mahasiswa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi mahasiswa.
- 04.04. Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di tempat kerja.
- 04.05. Pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana.
- 04.06. Pelayanan Infertilitas dan Kesehatan Reproduksi Lainnya
Naskah-naskah berkaitan dengan pelayanan infertilitas dan kespro lainnya.
- 04.07. Kemitraan dan Jejaring Kesehatan Reproduksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan dan jejaring kesehatan reproduksi.
- 04.08. Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Reproduksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan/penyeliaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi.
- 05. Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)
 - 05.01. Penyelenggaraan Puskesmas santun lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu di Rumah Sakit.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Puskesmas santun lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu di Rumah Sakit.
 - 05.02. Posyandu Lanjut Usia/Pelayanan Home Care/*Long Term Care* (PJP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Lanjut Usia/pelayanan *homecare/long term care* (PJP).
 - 05.03. Kemitraan LP/LS dalam penyelenggaraan kesehatan lansia.

- Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan LP/LS dalam penyelenggaraan kesehatan lansia
- 05.04. TOT/Pelatihan/Orientasi Kesehatan Lanjut Usia
Naskah-naskah yang terkait berkaitan dengan TOT/pelatihan/orientasi kesehatan lanjut usia.
- 05.05. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Lanjut Usia.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Lanjut Usia.
- 05.06. Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lansia.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan/penyeliaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi program kesehatan lansia.
- 05.07. Data Dan Informasi Kesehatan Lansia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan lansia.
- 05.08. Isu Global Kesehatan Lansia
Naskah-naskah yang terkait berkaitan dengan isu global kesehatan lansia.
06. Kesehatan Kelompok Rentan
- 06.01. Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan bagi KtP/A dan TPPO.
- 06.02. Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan PPAM kelompok rentan.
- 06.03. Pelayanan Kesehatan Bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- 06.04. Pengarusutamaan Gender
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.
- 06.05. Isu-Isu Global Kelompok Rentan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan isu-isu global kelompok rentan.

KI. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

01. Registrasi Dokter

01.01. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter/dokter spesialis meliputi pengajuan permohonan registrasi sampai dengan penerbitan surat tanda registrasi.

01.02. Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan surat tanda registrasi dokter/dokter spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan pencabutan.

01.03. Penerbitan Registrasi Dokter Sementara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi sementara kepada dokter/dokter spesialis warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang bersifat sementara di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter sementara sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

01.04. Penerbitan Registrasi Dokter Bersyarat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat kepada peserta program pendidikan dokter/dokter spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

01.05. Her Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi ulang surat tanda registrasi dokter/dokter spesialis meliputi surat permohonan kepada ketua Konsil Kedokteran Indonesia beserta lampiran persyaratannya,

pertimbangan ketua divisi registrasi kedokteran dan ketua divisi pembinaan kedokteran.

02. Standar Pendidikan Profesi Dokter

02.01. Pendidikan Profesi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter.

02.02. Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter spesialis meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter spesialis.

02.03. Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan cabang ilmu kedokteran meliputi pengesahan dan penerapan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran.

02.04. Pendidikan Berkelanjutan Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan berkelanjutan dokter.

02.05. Pengesahan Standar Kompetensi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan standar kompetensi dokter.

03. Registrasi Kedokteran Gigi

03.01. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis meliputi

pengajuan permohonan registrasi sampai dengan penerbitan surat tanda registrasi.

03.02. Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan surat tanda registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan pencabutan.

03.03. Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Sementara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi sementara kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dibidang kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia meliputi dari pengajuan permohonan registrasi dokter sementara sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

03.04. Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Bersyarat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis bersyarat kepada peserta program pendidikan dokter gigi/dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis bersyarat sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi.

03.05. Her Registrasi Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi ulang surat tanda registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis meliputi surat permohonan kepada ketua konsil kedokteran indonesia beserta lampiran persyaratannya, pertimbangan ketua divisi registrasi kedokteran gigi dan ketua divisi pembinaan kedokteran gigi.

04. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi

04.01. Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter gigi.

04.02. Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi spesialis, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis.

04.03. Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi pengesahan dan penerapan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi.

04.04. Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter gigi meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan berkelanjutan dokter gigi.

04.05. Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan standar kompetensi dokter gigi.

05. Pembinaan Praktik

05.01. Pembinaan Praktik Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan praktik dokter yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan etika

profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan registrasi dokter.

05.02. Pembinaan Praktik Dokter Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan praktik dokter gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan registrasi dokter gigi.

06. Pelayanan Hukum

06.01. Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran disiplin kedokteran.

06.02. Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran disiplin kedokteran gigi.

06.03. Persidangan Pemeriksaan Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan investigasi terhadap dokter atau dugaan adanya pelanggaran kode etik kedokteran atau pelanggaran disiplin kedokteran sampai dengan surat keputusan persidangan.

06.04. Persidangan Pemeriksaan Kedokteran Gigi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan investigasi terhadap dokter gigi atau dugaan adanya pelanggaran kode etik kedokteran gigi atau pelanggaran disiplin kedokteran meliputi surat pemberitahuan sampai dengan surat keputusan persidangan.

06.05. Tindak Lanjut/Eksekusi Keputusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindakan penentuan eksekusi yang berupa teguran, pencabutan surat tanda registrasi atas kasus yang telah ditetapkan.

KJ. KESEHATAN JIWA

01. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan
 - 01.01. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Institusi
Naskah-naskah terkait promosi kesehatan jiwa dan kemitraan di institusi.
 - 01.02. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Organisasi Lainnya
Naskah-naskah terkait promosi kesehatan jiwa dan kemitraan di organisasi lainnya.
02. Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa
 - 02.01. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dan atau Disabilitas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada anak dan remaja berkebutuhan khusus dan atau penyandang disabilitas.
 - 02.02. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Usia Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada usia sekolah dan remaja.
 - 02.03. Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja dalam Penanganan Masalah Kasus Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada anak dan remaja dalam penanganan dampak kekerasan perundungan, adiksi, dan masalah kesehatan jiwa anak dan remaja lainnya.
 - 02.04. Penjangkauan Pelayanan dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa melalui Kesehatan Jiwa Bergerak
Naskah-naskah yang berkaitan dalam bidang penjangkauan pelayanan dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada masyarakat melalui kesehatan jiwa bergerak (MMHS).
 - 02.05. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa
Naskah-naskah yang berkaitan dalam pencegahan kasus bunuh diri, demensia, alzheimer dan masalah kesehatan jiwa pada perempuan, Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), Ibu Bersalin (Bulin) dan Ibu Nifas (Bufas) serta masalah kesehatan jiwa lainnya.

03. Tata Kelola Gangguan Jiwa
 - 03.01. Kasus Gangguan Jiwa Berat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus gangguan jiwa berat antara lain schizophrenia, gangguan bipolar, depresi berat, kasus pasung dan lain-lain
 - 03.02. Kasus Gangguan Jiwa Ringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus gangguan jiwa antara lain kecemasan, depresi ringan, dan lain-lain.
 - 03.03. Kegawatdaruratan Kesehatan Jiwa pada Situasi Krisis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan situasi kegawatdaruratan.
04. Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
 - 04.01. Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan NAPZA di institusi.
 - 04.02. Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan NAPZA di masyarakat.
 - 04.03. Upaya Promotif NAPZA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan promotif NAPZA.
 - 04.04. Upaya Preventif NAPZA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan preventif NAPZA.
 - 04.05. Upaya Kuratif NAPZA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan kuratif NAPZA.
 - 04.06. Upaya Rehabilitatif NAPZA

Naskah naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitatif NAPZA.

05. Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 05.01. Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan jiwa.
 - 05.02. Sistem Informasi Kesehatan Jiwa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan jiwa.
 - 05.03. Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan advokasi kesehatan jiwa dan NAPZA.
06. Hari Besar Kesehatan Jiwa
 - 06.01. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari kesehatan jiwa sedunia.
 - 06.02. Peringatan Hari Besar Kesehatan Jiwa Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari peduli autisme sedunia, hari pencegahan bunuh diri sedunia, hari alzheimer sedunia.
07. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader terkait Kesehatan Jiwa
 - 07.01. Anak dan Remaja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait kesehatan jiwa pada anak dan remaja termasuk penyusunan akreditasi.
 - 07.02. Dewasa dan Lansia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait kesehatan jiwa pada usia dewasa dan lansia termasuk penyusunan akreditasi.
 - 07.03. Penanganan Gangguan NAPZA
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait penanganan gangguan NAPZA termasuk penyusunan akreditasi.

KK. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

01. NSPK Penanggulangan Krisis Kesehatan

01.01. Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan pencegahan dan mitigasi.

01.02. Ketahanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan ketahanan kesehatan.

01.03. Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan dan pedoman tanggap darurat serta kegawatdaruratan medis.

01.04. Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan terkait evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

01.05. Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan terkait kerja sama *United Nations* dan kemitraan lainnya.

01.06. Pengelolaan Data dan Informasi Pemantauan Krisis Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan dan penyusunan buku-buku tinjauan serta buku profil.

01.07. Revitalisasi Gudang Regional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan gudang.

01.08. Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan Logistik dan Barang Milik Negara.

02. Bimbingan, Informasi, Evaluasi dan Koordinasi

02.01. Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan prakrisis kesehatan dan koordinasi pentahelix, asistensi pengelolaan krisis kesehatan, *workshop*, rencana

kontingensi dan peta risiko untuk pengurangan risiko krisis kesehatan, penyusunan kajian pengelolaan krisis kesehatan akibat bencana, penyusunan laporan pengelolaan krisis kesehatan untuk pimpinan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin kesiapsiagaan.

02.02. Ketahanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *workshop* untuk ketahanan kesehatan, dan simulasi pengelolaan krisis kesehatan, dan laporan rutin Ketahanan Kesehatan.

02.03. Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan tanggap darurat, kaji cepat kesehatan, kegawatdaruratan medis, pelatihan-pelatihan Tim, dan fasilitasi kegiatan pendampingan kaji cepat bidang kesehatan, dan laporan rutin tanggap darurat dan kegawatdaruratan medis. Koordinasi yang berkaitan mobilisasi tim kegawatdaruratan medis, relawan, dan logistik kesehatan.

02.04. Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi tanggap darurat krisis kesehatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, fasilitasi kegiatan pendampingan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan, serta penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

02.05. Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan , pemantauan dan evaluasi, dan laporan rutin Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya, lembaga di bawah *United Nations* (WHO dan UNICEF dan Kemitraan Lainnya), memfasilitasi pelaksanaan program-program kerja yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

- 02.06. Pengelolaan Data dan Informasi, Pemantauan Krisis Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring data dan informasi, Membuat dan mengelola *website* dan media sosial, pemantauan informasi, Sistem Informasi Pengelolaan Krisis Kesehatan, pemantauan dan evaluasi, *Workshop* Sistem Informasi Penanggulangan Krisis.
- 02.07. Revitalisasi Gudang Regional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan, pemantauan serta pembukuan logistik kesehatan di 10 PPK Regional di luar DKI Jakarta, serta pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan laporan rutin Revitalisasi Gudang Regional.
- 02.08. Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan serta pembukuan, pemantauan logistik kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, penerimaan donasi logistik kesehatan, pendistribusian donasi logistik kesehatan, pencatatan penerimaan dan distribusi logistik kesehatan, penyusunan berita acara/berita acara sementara penerimaan dan distribusi logistik kesehatan/non-medik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin Logistik dan Barang Milik Negara.

KL. KESEHATAN LINGKUNGAN

01. Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan Lingkungan
- 01.01. Penyehatan Air
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan air meliputi pengamanan air minum dan pengawasan kualitas air minum.
- 01.02. Penyehatan Udara
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi udara meliputi pengamanan udara dan pengawasan kualitas udara.

- 01.03. **Penyehatan Tanah**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi tanah, pengamanan tanah dan pengawasan kualitas tanah.
- 01.04. **Penyehatan Sanitasi Dasar**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi dasar meliputi penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, percepatan pengembangan sanitasi pemukiman dan sanitasi sekolah.
- 01.05. **Penyehatan Kawasan**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan kawasan meliputi higiene sanitasi dan bangunan umum, pengendalian faktor risiko di rumah dan tempat umum, penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan, fasilitasi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, pelabuhan sehat, bandara sehat, terminal sehat, pasar sehat dan kabupaten kota sehat.
- 02. **Penyehatan Pangan**
 - 02.01. **Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan higiene sanitasi pangan meliputi makanan jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga, depot air minum, kantin dan rumah tangga.
 - 02.02. **Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi Pangan**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan meliputi makanan jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga, depot air minum, kantin dan rumah tangga.
- 03. **Pengamanan Limbah dan Radiasi**
 - 03.01. **Pengamanan Limbah**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan limbah meliputi limbah fasilitas pelayanan kesehatan, merkuri logam berat dan pengaman pestisida.
 - 03.02. **Pengamanan Radiasi**
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan radiasi meliputi analisis dampak kesehatan

lingkungan, radiasi pengion, radiasi non-pengion dan perubahan iklim.

04. Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan

04.01. Adaptasi Perubahan Iklim

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan adaptasi perubahan iklim.

04.02. Kebencanaan Bidang Kesehatan Lingkungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kebencanaan dalam bidang kesehatan lingkungan.

KO. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

01. Okupasi dan surveilans kesehatan kerja

01.01. Kesehatan Okupasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, program kembali kerja, pelayanan kesehatan kerja, standar penyelenggaraan pelayanan kedokteran okupasi, petunjuk teknis pelayanan kesehatan kerja di unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan modul ToT diagnostik Penyakit Akibat Kerja (PAK) di bidang kesehatan okupasi.

01.02. Surveilans Kesehatan Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), pemeriksaan kelayakan kerja, pemeriksaan kesehatan pelaut, pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di bidang surveilans kesehatan kerja.

02. Kesehatan Kerja

02.01. Kesehatan Kerja Formal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan kerja formal.

02.02. Kesehatan Kerja Informal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan kerja informal.

03. Kesehatan Olahraga

03.01. Kesehatan Olahraga Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebugaran jasmani bumil, anak sekolah, pekerja, karyawan, usia produktif, usia lanjut, dan jemaah haji di bidang kesehatan olahraga.

03.02. Kesehatan Olahraga Prestasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dukungan *event* olahraga nasional dan internasional di bidang kesehatan olahraga prestasi.

KT. TENAGA KESEHATAN INDONESIA

01. Fasilitas Registrasi

01.01. Registrasi Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mekanisme penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan, kajian masalah registrasi, data STR, rekonsiliasi dan validasi data STR, sosialisasi STR dan laporan kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan tenaga kesehatan.

01.02. Registrasi Psikologi Klinis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi psikologi klinis.

01.03. Registrasi Perawat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi Perawat.

01.04. Registrasi Bidan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi bidan.

01.05. Registrasi Kefarmasian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi kefarmasian.

01.06. Registrasi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan masyarakat.

- 01.07. Registrasi Tenaga Kesehatan Lingkungan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan lingkungan.
- 01.08. Registrasi Tenaga Gizi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga gizi.
- 01.09. Registrasi Tenaga Keterampilan Fisik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga keterampilan fisik.
- 01.10. Registrasi Tenaga Keteknisian Medis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga keteknisian medis.
- 01.11. Registrasi Tenaga Biomedis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga biomedis.
- 01.12. Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan tradisional.
- 02. Fasilitas Standardisasi
 - 02.01. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar kompetensi tenaga kesehatan.
 - 02.02. Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar kompetensi kerja tenaga kesehatan.
 - 02.03. Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan.
 - 02.04. Standar Praktik Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar praktik tenaga kesehatan.
- 03. Fasilitas Pembinaan Keprofesian
 - 03.01. Pembinaan Keprofesian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan keprofesian seperti *e-learning* tenaga kesehatan dan Evaluasi Kemampuan (EK) *online* tenaga kesehatan.

- 03.02. Pengembangan Keprofesian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan keprofesian seperti seminar, webinar, penyusunan keprofesian, dan bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan.
- 04. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan
 - 04.01. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penegakan disiplin tenaga kesehatan seperti permasalahan dan pelanggaran praktik tenaga kesehatan.
 - 04.02. Disiplin Praktik Psikologi Klinis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik psikologi klinis.
 - 04.03. Disiplin Praktik Perawat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik perawat.
 - 04.04. Disiplin Praktik Bidan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik bidan.
 - 04.05. Disiplin Praktik Kefarmasian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik kefarmasian.
 - 04.06. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan masyarakat.
 - 04.07. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan lingkungan.
 - 04.08. Disiplin Praktik Tenaga Gizi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga gizi.
 - 04.09. Disiplin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga keterampilan fisik.
 - 04.10. Disiplin Praktik Keteknisian Medis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik keteknisian medis.

- 04.11. Disiplin Praktik Keteknisian Medis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik keteknisian medis.
- 04.12. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan tradisional.
- 05. Fasilitasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
 - 05.01. Bahan Pertimbangan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan.
 - 05.02. Bahan Pertimbangan Penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

PG. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

- 01. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
 - 01.01. Pendayagunaan Dokter Spesialis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.
 - 01.02. Program Internsip Dokter Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan

meliputi, kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan, dan pemulangan.

01.03. Komite Internsip Dokter Indonesia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembekalan, pemberangkatan, pendampingan, pemulangan dan survei lapangan.

01.04. Penugasan Khusus *Team Based*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.

01.05. Penugasan Khusus Individual

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.

01.06. Penugasan Khusus Residen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembekalan,

pemberangkatan, pendampingan, pemulangan dan survei lapangan.

- 01.07. Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis kepada UPT Kementerian Kesehatan yang meliputi, monitoring dan evaluasi terkait pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

02. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) dan Purna Penempatan Luar Negeri

- 02.01. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNI LLN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan WNI LLN yang meliputi, kebijakan, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, pembekalan, dan penempatan.

- 02.02. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Purna Penempatan Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan purna penempatan luar negeri yang meliputi, kebijakan, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, pelaksanaan *job-fair*, pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

- 02.03. Pembinaan teknis kepada UPT Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNI LLN dan Purna Penempatan Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis kepada UPT yang meliputi monitoring dan evaluasi.

03. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia
 - 03.01. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan Indonesia ke luar negeri yang meliputi kebijakan, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, rekrutmen, uji seleksi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan Indonesia ke luar negeri termasuk pendampingan serta fasilitasi kunjungan delegasi ke negara tujuan.
 - 03.02. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNA di Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan WNA di Indonesia yang meliputi pelayanan, pendidikan, pelatihan, bakti sosial, penelitian, kondisi darurat bencana, dan kegiatan lainnya.
 - 03.03. Pembinaan Teknis terkait Bidang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan WNA di Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengawasan teknis pendayagunaan tenaga kesehatan WNA.
04. Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis WNI LLN dan WNA yang melaksanakan Adaptasi
 - 04.01. Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis WNI LLN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis WNI LLN yang meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, survei lapangan,

pembekalan, pemberangkatan, penempatan, pendampingan, dan pemulangan.

- 04.02. Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis WNA yang melaksanakan Adaptasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis WNA yang melaksanakan adaptasi, meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi dan penempatan.

- 04.03. Pembinaan Teknis terkait Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis WNI LLN dan WNA yang melaksanakan Adaptasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis yang meliputi monitoring dan evaluasi.

PL. PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN

01. Kebutuhan Pelatihan Bidang Kesehatan

- 01.01. Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan NSPK analisis kompetensi kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan yang meliputi penyusunan draf, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, dan pengolahan data instrumen.

- 01.02. Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan NSPK analisis kompetensi kebutuhan pelatihan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang meliputi penyusunan draf, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, dan pengolahan data instrumen.

- 01.03. Penilaian Potensi, Kompetensi, serta Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian potensi, kompetensi, serta sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang meliputi

penyusunan instrumen, uji coba instrumen dan skema sertifikasi, penyelenggaraan penilaian, pengelolaan hasil, dan pemanfaatan hasil penilaian potensi, kompetensi dan sertifikasi.

01.04. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi kepada LSP bidang kesehatan, pemberian sertifikasi kompetensi kerja, dan kegiatan LSP lainnya.

01.05. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang meliputi pemetaan kebutuhan pelatihan, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan hasil.

02. Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan

02.01. Program Pelatihan Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pelatihan tenaga kesehatan meliputi penyusunan surat keputusan, penyusunan modul dan kurikulum, serta surat keterangan pengesahan kurikulum.

02.02. Program Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pelatihan tenaga penunjang kesehatan meliputi penyusunan surat keputusan, penyusunan modul dan kurikulum, serta surat keterangan pengesahan kurikulum.

02.03. Penyelenggaraan Pelatihan

Naskah-naskah penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan meliputi pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi.

03. Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan

03.01. Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan institusi pelatihan yang meliputi penyusunan NSPK, penyusunan instrumen akreditasi institusi, proses akreditasi institusi,

penyusunan surat keputusan penetapan, rekomendasi sertifikat, dan kegiatan penjaminan mutu institusi pelatihan.

03.02. Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang meliputi penyusunan NSPK, penyusunan instrumen akreditasi pelatihan, proses akreditasi pelatihan, penyusunan surat keputusan penetapan, rekomendasi, sertifikat, serta kegiatan penjaminan mutu pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.

04. Peningkatan Kompetensi

04.01. Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional di bidang peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

04.02. Pembinaan Teknis Peningkatan Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis peningkatan mutu tenaga kesehatan yang meliputi pembinaan teknis penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan kepada UPT Kementerian Kesehatan di bidang tenaga kesehatan.

PK. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

01. Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan

01.01. Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait strategi komunikasi risiko, informasi dan edukasi kesehatan serta pendekatan komunikasi kepada sasaran (tenaga kesehatan, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat).

- 01.02. Pengembangan Pesan
Naskah-naskah pengembangan pesan kesehatan di puskesmas, Rumah Sakit, pengembangan pesan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, malaria, HIV, TBC, penyakit tidak menular dan penyakit lainnya.
- 01.03. Desain Kreatif Pesan Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi model edukasi kesehatan masyarakat (bumil, usia produktif dan lansia) meliputi masyarakat sosial, media cetak, audiovisual, dan jenis desain.
- 02. Penyebarluasan Informasi Kesehatan
 - 02.01. Penyebarluasan Informasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media di pusat, provinsi, kabupaten/kota.
 - 02.02. Kampanye Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi kampanye kesehatan berupa media cetak, media elektronik, dan media sosial dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19, malaria, HIV, TBC, penyakit tidak menular serta pengendalian tembakau/rokok pada bumil, usia produktif dan lansia.
- 03. Advokasi Kesehatan
 - 03.01. Advokasi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait advokasi kesehatan.
 - 03.02. Kebijakan yang disusun oleh Sektoral, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Naskah-naskah yang berisi tentang kebijakan yang sudah disusun oleh kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait program kesehatan masyarakat, dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran gubernur dan instruksi gubernur.

- 03.03. Komitmen dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang komitmen sektoral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam mendukung kesehatan masyarakat.
04. Kemitraan Kesehatan
- 04.01. Kemitraan Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait kemitraan kesehatan.
- 04.02. MoU dalam mendukung Program Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang MoU dengan dunia usaha, lembaga kemasyarakatan yang mempunyai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang kesehatan.
- 04.03. Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung Program Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang perjanjian kerja sama dengan dunia usaha yang sebelumnya telah melewati proses MoU.
- 04.04. Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pembinaan teknis jabatan fungsional promosi kesehatan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 04.05. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Naskah-naskah yang berisi tentang pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bersama mitra.
05. Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan
- 05.01. Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan.

- 05.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang peningkatan kapasitas SDMK masyarakat meliputi peningkatan SDM di provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas.
- 05.03. Penggerakan Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan
Naskah-naskah yang berisi tentang penggerakan promosi kesehatan di institusi Pendidikan (Sekolah/Madrasah dan Pesantren), tempat ibadah, tempat kerja dan tempat umum.
- 05.04. Penggerakan 7 Materi Prioritas Promosi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang penggerakan 7 materi prioritas promosi kesehatan (imunisasi, olahraga, gizi seimbang, personal higienis dan sanitasi lingkungan, skrining, anti merokok, dan kepatuhan minum obat).
- 05.05. Saka Bakti Husada (SBH)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan SBH dan Perkemahan Bakti SBH Nasional (PERTINAS)
- 05.06. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rumah Sakit yang melakukan promosi kesehatan.
- 05.07. Promosi Kesehatan Bencana/Tim Gerak Cepat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi kesehatan bencana/tim gerak cepat.
- 06. Pengorganisasian Masyarakat
 - 06.01. Pengorganisasian Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait pengorganisasian masyarakat.
 - 06.02. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Posyandu, Poskesdes, dana desa yang terkait dengan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat/UKBM.

- 06.03. Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pokjanal desa dan kelurahan siaga aktif dan Pokjanal Posyandu/forum peduli kesehatan.
- 06.04. *International Non-Government Organization* (INGO)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penggerakan masyarakat khususnya bidang kesehatan.
- 07. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
 - 07.01. Peran Serta Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait peran serta masyarakat.
 - 07.02. Organisasi Kemasyarakatan/LSM
Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam negeri yang bergerak di bidang kesehatan.
 - 07.03. Institusi Keagamaan yang Menyelenggarakan Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan lain sebagainya.
 - 07.04. Kelompok Potensial yang Melaksanakan Gerakan Masyarakat Bidang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dasa Wisma, kelompok nelayan, petani, dan lainnya.
- 08. Data dan Analisis Perilaku
 - 08.01. Data dan Analisis Perilaku
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait data dan analisis perilaku.
 - 08.02. Data Perilaku dan Analisis semua siklus kehidupan
Naskah-naskah yang berisi tentang Data Perilaku dan Analisis semua siklus kehidupan.

- 08.03. Komunikasi risiko dan strategi 7 materi prioritas Promosi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang Komunikasi risiko dan strategi 7 materi prioritas promosi kesehatan (imunisasi, olahraga, gizi seimbang, personal higienis dan sanitasi lingkungan, skrining, anti merokok, dan kepatuhan minum obat).
- 08.04. Standar Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
Naskah-naskah yang berisi tentang Standar Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan.
- 08.05. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Naskah-naskah yang berisi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- 09. Perilaku Bumil, Anak dan Remaja
 - 09.01. Perilaku Bumil, Anak dan Remaja
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait perilaku bumil, anak dan remaja.
 - 09.02. *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan siklus bumil, anak dan remaja
Naskah-naskah yang berisi tentang *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan siklus bumil, anak dan remaja.
 - 09.03. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
Naskah-naskah yang berisi tentang promosi kesehatan pada Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).
- 10. Perilaku Usia Produktif dan Lansia
 - 10.01. Perilaku Usia Produktif dan Lansia
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait perilaku usia produktif dan lansia.
 - 10.02. *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan siklus usia produktif dan lansia
Naskah-naskah yang berisi tentang *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan siklus usia produktif dan lansia.

PM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

01. TBC

01.01. Pengendalian Penyakit TBC

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian penyakit TBC.

01.02. Pengobatan TBC

Naskah-naskah yang berkaitan dengan TBC, *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS), Wakil Supervisor (WASOR) TBC, TBC anak, TBC HIV, Keperawatan TBC, TBC di lembaga pemasyarakatan dan TBC diabetes melitus.

01.03. Laboratorium TBC

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laboratorium TBC.

01.04. Obat Anti TBC

Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat anti TBC.

01.05. TBC *Operational Research* (TORG)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan TORG.

01.06. Logistik TBC

Naskah-naskah yang berkaitan dengan logistik TBC.

02. Pengendalian AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual

02.01. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBCP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan STBCP/*Integrated Bio-Behavioural Surveillance* (IBBS)

02.02. HIV

Naskah-naskah yang berkaitan dengan HIV.

02.03. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan IMS meliputi perawatan, Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), konseling dan test.

02.04. Obat Anti Retro Viral (ARV) dan Reagen Tes HIV

Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat ARV dan reagen tes HIV.

02.05. Kelompok Kerja Pengendalian AIDS dan Penyakit IMS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja dan komite ahli dalam pengendalian AIDS dan penyakit IMS.

03. Pengendalian Penyakit Menular

03.01. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian ISPA, *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus* (MERS CoV), pneumonia, dan Penyakit ISPA lainnya.

03.02. Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian infeksi penyakit infeksi saluran pencernaan (diare, disentri, kolera, hepatitis, tifoid, dan penyakit infeksi saluran pencernaan lainnya).

03.03. Penyakit Tropis Menular

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit tropis menular langsung (kusta, frambusia, ulkus, penyakit *neglected tropical diseases*, dan penyakit tropis menular langsung lainnya).

03.04. Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Menular

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja dan komite ahli dalam pengendalian Penyakit Menular meliputi hepatitis, kusta, frambusia dan penyakit menular lainnya.

PN. PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

01. Proyeksi dan Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan

01.01. Proyeksi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proyeksi tenaga kesehatan berdasarkan *supply* dan *demands/needs* tenaga kesehatan, dokumen penyusunan identifikasi data, penyusunan petunjuk teknis, diseminasi petunjuk teknis, finalisasi petunjuk teknis, dan dokumen sosialisasi *supply demands/needs* tenaga kesehatan serta pelaporan proyeksi tenaga kesehatan dan penyusunan analisis kesenjangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan nasional.

- 01.02. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan produksi tenaga kesehatan, penyusunan pemetaan produksi dokter, bidan, dan perawat serta pelaporan pemetaan produksi tenaga kesehatan, dan penyusunan rencana adaptasi dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, WNI LLN dan WNA.
- 01.03. Penetapan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Baru
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan jenis tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan baru.
02. Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung
- 02.01. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung meliputi dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, penyusunan dan sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pelaporan.
- 02.02. Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan program prioritas, identifikasi, penyusunan, diseminasi, finalisasi penyusunan Juknis, sosialisasi dan monitoring serta pelaporan.
- 02.03. Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan seperti

kegiatan penyusunan formasi ASN dan pemanfaatan lainnya.

03. Strategi Nasional Pemenuhan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

03.01. Strategi Nasional Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi nasional pemenuhan tenaga kesehatan meliputi rekomendasi dan pelaporan kebijakan strategi nasional tenaga kesehatan dan penyusunan rencana pemenuhan, produksi, distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan jangka menengah dan jangka panjang.

03.02. Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan meliputi penyusunan dokumen strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan, diseminasi dokumen strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan dan pelaporan.

04. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan

04.01. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengembangan tenaga kesehatan meliputi analisa, uji coba, dan hasil uji coba penyusunan pedoman perencanaan pengembangan tenaga kesehatan dan kegiatan pada pengembangan aplikasi bursa kerja tenaga kesehatan serta pelaporan.

04.02. Perencanaan Evaluasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana evaluasi kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan WNI LLN dan WNA.

04.03. Pembinaan Teknis Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah meliputi koordinasi

pembinaan wilayah terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), koordinasi pembinaan wilayah terkait pemantauan 9 (sembilan) penyakit prioritas, dan program lain termasuk lokus penugasan khusus serta pelaporan kegiatan fasilitas dan pembinaan pemerintah daerah.

PT. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

01. Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan ASN

01.01. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan diantaranya NSPK meliputi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, peraturan presiden tentang tunjangan, dan standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

01.02. Permohonan Rekomendasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat dari instansi pemerintah pusat dan daerah tentang permohonan rekomendasi formasi dan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

01.03. Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan.

01.04. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekapitulasi data pejabat fungsional kesehatan serta pemanfaatan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan.

02. Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Non ASN

02.01. Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan karier tenaga kesehatan non ASN diantaranya NSPK meliputi pedoman skema karier tenaga kesehatan non ASN, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan non-ASN, dan skema sertifikasi.

- 02.02. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi kepada LSP bidang kesehatan, pemberian sertifikasi kompetensi kerja, dan kegiatan LSP lainnya.
- 02.03. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non-ASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kepada LSP bidang kesehatan dan pengelolaan karier tenaga kesehatan non-ASN.
- 02.04. Sistem Informasi Karier Tenaga Kesehatan Non-ASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi karier tenaga kesehatan non-ASN.
- 03. Pengawasan Tenaga Kesehatan
 - 03.01. Pengelolaan Pengaduan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan adanya laporan atau pengaduan dari instansi pusat dan daerah terhadap pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan.
 - 03.02. Pelaksanaan Penyidikan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tim penyidik tenaga kesehatan, laporan hasil penyidikan serta tindak lanjut pelaksanaan penyidikan.
 - 03.03. Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan tenaga kesehatan.
- 04. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan
 - 04.01. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan NSPK dan regulasi perlindungan tenaga kesehatan, standar pengupahan tenaga kesehatan, dan penghargaan tenaga kesehatan.
 - 04.02. Pemantauan dan Evaluasi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan evaluasi kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan.

PV. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK

01. Pengendalian Malaria

01.01. Kelambu Berinsektisida (*Long-Lasting Insecticidal Nets* (LLINs))

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelambu berinsektisida.

01.02. Eliminasi Malaria

Naskah-naskah yang berkaitan dengan eliminasi malaria.

02.03. *Crosschecker* Mikroskopis Malaria

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *crosschecker* mikroskopis malaria.

02. Pengendalian Arbovirosis

02.01. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan DBD meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

02.02. Chikungunya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan chikungunya meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

02.03. *Japanese Encephalitis*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Japanese encephalitis* meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

02.04. Virus Zika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan virus zika meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

03. Pengendalian Zoonosis

03.01. Penyakit Flu Burung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu burung meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

03.02. Penyakit Rabies

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit rabies meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

03.03. Penyakit Pes

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit pes meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

- 03.04. Penyakit Flu Baru
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu baru meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
- 03.05. Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tumbuhan beracun meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
- 03.06. Penyakit Bersumber Binatang Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit bersumber binatang lainnya diantaranya leptospirosis, antraks, dan lain-lain, meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
- 04. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
 - 04.01. Filariasis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit filariasis meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 04.02. Kecacingan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kecacingan meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 04.03. Schistosomiasis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan schistosomiasis meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
- 05. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 - 05.01. Pengendalian Vektor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian vektor.
 - 05.02. Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian binatang pembawa penyakit.
 - 05.03. Uji Resistensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji resistensi pencegahan dan pengendalian tular vektor zoonotik.

RS. PELAYANAN KESEHATAN DI RS DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

01. Pelayanan Kesehatan di RS

01.01. Pelayanan Medis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis seperti rawat inap, rawat jalan, rawat inap intensif, pelayanan tindakan operatif, layanan tindakan non operatif, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

01.02. Pelayanan Penunjang

Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi dan diagnostik, farmasi (resep obat), gizi, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, rehabilitasi medik, optik, hiperbarik, dan lain-lain.

01.03. Pelayanan Non-Medis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan non-medis seperti promosi kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RS, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, kesehatan lingkungan dan lain-lain.

01.04. Rekam Medis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas pasien yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya.

01.05. Forensik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forensik.

01.06. *Visum et repertum*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *visum et repertum*.

01.07. Transplantasi Organ

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan transplantasi organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, dan lain-lain.

02. Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya

02.01. Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di fasilitas kesehatan lainnya seperti

rawat inap, rawat jalan, rawat inap intensif, pelayanan tindakan operatif, layanan tindakan non-operatif, dan IGD.

- 02.02. Pelayanan Penunjang di Fasilitas Kesehatan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penunjang di fasilitas kesehatan lainnya seperti laboratorium, radiologi dan diagnostik, farmasi, gizi, CSSD, binatu, rehabilitasi medik, optik, hiperbarik, dan lain-lain.
- 02.03. Pelayanan Non-Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan non-medis di fasilitas kesehatan lainnya seperti promosi kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, kesehatan lingkungan dan lain-lain.
- 02.04. Rekam Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya
Naskah-naskah yang terkait dengan berkas pasien di fasilitas kesehatan lainnya yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lainnya

SR. SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

01. Surveilans

- 01.01. Surveilans Penyakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans penyakit seperti difteri, polio, dan lain sebagainya.
- 01.02. Surveilans KLB
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans KLB, respons cepat, dan fasilitasi.
- 01.03. Surveilans Kesehatan Lingkungan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan lingkungan.
- 01.04. Surveilans Epidemiologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans epidemiologi meliputi epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular.

- 01.05. Kewaspadaan Dini
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kewaspadaan dini.
- 01.06. Respon KLB dan Wabah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan respons KLB dan wabah.
- 02. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
 - 02.01. Hapus Serangga dan Hapus Tikus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian hapus serangga dan hapus tikus.
 - 02.02. Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan
Naskah-naskah yang berkaitan teknis pengendalian risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), pemukiman, *event* khusus, tempat kerja, industri farmasi dan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 02.03. Vaksinasi Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan vaksinasi internasional (*yellow fever*, meningitis, dan vaksin baru lainnya) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 02.04. Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan.
 - 02.05. Pengangkutan Orang Sakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan orang sakit meliputi penjemputan, pelayanan kesehatan, dan perizinan.
 - 02.06. Pengiriman Jenazah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengiriman jenazah baik dalam bentuk utuh maupun abu jenazah meliputi penjemputan dan perizinan.
 - 02.07. Dokumen Perjalanan KLB dan Wabah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perjalanan pada masa KLB dan wabah, misalnya *health alert card*.

- 03. Penyakit Infeksi Emerging
 - 03.01. Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang penyakit poliomyelitis, virus ebola, virus MERS, influenza A (H5N1) flu burung, virus hanta, virus nipah, *yellow fever*, demam lassa, demam congo meningitis, COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.
 - 03.02. Deteksi Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan intervensi penyakit infeksi emerging.
 - 03.03. Intervensi Penyakit Infeksi Emerging

Naskah-naskah yang berkaitan dengan intervensi penyakit infeksi emerging.
- 04. Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT
 - 04.01. Sertifikat Kesehatan Manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian sertifikat *international certificate of vaccination* (ICV).
 - 04.02. Sertifikat Kesehatan Moda Transportasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan penerbitan sertifikat meliputi *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC), *Certificate of Pratique* (CoP), *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) dan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC), Sertifikat obat dan alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), dan Sertifikat Air Bersih.
 - 04.03. Sertifikat Kesehatan Barang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan penerbitan sertifikat atau surat keterangan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Barang Adiktif (OMKABA).
 - 04.04. Sertifikat Kesehatan Lingkungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian sertifikat meliputi sertifikat air bersih, sertifikat penyelenggaraan perusahaan fumigasi di kapal, sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga, sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan, sertifikat obat dan alat P3K.

- 04.05. Surat Keterangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian surat keterangan meliputi hasil uji laboratorium rujukan, penerbitan surat izin pengangkutan jenazah, orang sakit yang laik terbang, surat keterangan pengujian kesehatan nakhoda/pilot dan Anak Buah Kapal (ABK).
- 04.06. Buku Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian buku kesehatan.
- 05. Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 05.01. Standardisasi Laboratorium Surveilans
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan standardisasi laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - 05.02. Pengembangan Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pengembangan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - 05.03. Penyelenggaraan Laboratorium Surveilans dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 06. Surveilans Terintegrasi
 - 06.01. Diseminasi Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi informasi di bidang surveilans terintegrasi laboratorium, surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respons KLB, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantina di pintu masuk dan wilayah.
 - 06.02. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengelolaan SDM di bidang surveilans terintegrasi; laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian

penyakit, kewaspadaan dini dan respons KLB, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah.

06.03. Fasilitasi Kemitraan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kemitraan di bidang surveilans terintegrasi laboratorium, surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respons KLB, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah.

SS. SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN

01. Penyusunan kebijakan teknis bidang analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan

01.01. Upaya Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan upaya kesehatan masyarakat.

01.02. Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.

01.03. Ketahanan dan Teknologi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.

01.04. Sumber Daya Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan sumber daya kesehatan.

02. Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan
 - 02.01. Upaya Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan upaya kesehatan masyarakat.
 - 02.02. Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.
 - 02.03. Ketahanan dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.
 - 02.04. Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan sumber daya kesehatan.
03. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - 03.01. Upaya Kesehatan Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem upaya kesehatan masyarakat.
 - 03.02. Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem pelayanan dan penunjang kesehatan.
 - 03.03. Ketahanan dan Teknologi Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem pelayanan dan penunjang kesehatan.

- 03.04. Sumber Daya Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem sumber daya kesehatan.

TK. TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN

- 01. Tata Kelola Sistem Rujukan
 - 01.01. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tata kelola sistem rujukan pelayanan kesehatan.
 - 01.02. Pengembangan Pelayanan *Telemedicine*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan *telemedicine* antar-fasilitas pelayanan kesehatan.
- 02. Pengelolaan Wahana Pendidikan dan RS Pendidikan
 - 02.01. Jejaring RS Pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jejaring RS dan *academic health system*.
 - 02.02. Program di RS Pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pelayanan jantung, pelayanan ginjal, pelayanan hati, pelayanan kanker, sel punca, teknologi dan reproduksi berbantu serta transplantasi organ di RS pendidikan.
 - 02.03. Teknologi Kesehatan
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan *Biomedical Genome-Based Science Initiative (BGSi)*.
 - 02.04. Program di RS Pendidikan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program dokter spesialis dan program RS pendidikan lainnya, seperti *fellowship*, *stase*, dan lain-lain.
- 03. Pengelolaan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan
 - 03.01. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan pada kegiatan nasional dan internasional lainnya.

- 03.02. Kerja Sama Bidang Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan kerja sama luar negeri bidang pelayanan kesehatan (*sister hospital*).
- 04. Pengelolaan BLU
 - 04.01. Penilaian Kinerja Pelayanan
Naskah-naskah yang berhubungan dengan fasilitasi pengelolaan manajemen BLU berupa penilaian kinerja pelayanan.
 - 04.02. Rencana Strategis Bisnis
Naskah-naskah yang berhubungan dengan fasilitasi pengelolaan manajemen BLU berupa rencana strategis bisnis.

TL. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM

- 01. Teknologi Pengendalian Penyakit
 - 01.01. Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan model dan teknologi tepat guna.
 - 01.02. Pengembangan dan Penapisan Teknologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan penapisan teknologi.
 - 01.03. Kemitraan dan Jejaring Kerja di Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan dan jejaring kerja di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium.
- 02. Teknologi Laboratorium
 - 02.01. Pengembangan Teknologi Laboratorium
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan teknologi laboratorium.
 - 02.02. Laboratorium Rujukan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laboratorium rujukan.
 - 02.03. Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji kendali mutu dan kalibrasi.

- 02.04 Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekomendasi hasil uji laboratorium.

TM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

- 01. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - 01.01 Penyakit Jantung
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit jantung meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 01.02. Penyakit Pembuluh Darah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit pembuluh darah meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 01.03. Penyakit Hipertensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit hipertensi meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 01.04. Penyakit Stroke
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit stroke meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
- 02. Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik
 - 02.01. Penyakit Diabetes Melitus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit diabetes melitus meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 02.02. Penyakit Gangguan Metabolik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit gangguan metabolik meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 02.03. Penyakit Gangguan Tiroid
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit gangguan tiroid meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 02.04. Gangguan Obesitas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan obesitas meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.

03. Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah
 - 03.01. Penyakit Kanker
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit kanker meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
 - 03.02. Penyakit Kelainan Darah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit kelainan darah seperti *Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP)*, hemofilia, thalassemia, dan penyakit kelainan darah lainnya, meliputi pencegahan sampai dengan pengobatan.
04. Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi
 - 04.01. Penyakit Akibat Produk Tembakau.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat produk tembakau.
 - 04.02. Gangguan Imunologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan imunologi (asma, lupus, dan penyakit gangguan imunologi lainnya).
05. Gangguan Indera dan Fungsional
 - 05.01. Pengendalian Gangguan Panca Indera
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian panca indera (mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah) seperti gangguan refraksi, katarak, glukoma, serumen prop/kotoran telinga, *Noise Induced Hearing Loss (NIHL)*, prebikusis, dan penyakit gangguan panca indera lainnya.
 - 05.02. Pengendalian Gangguan Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian gangguan fungsional, seperti pengendalian disabilitas dan tuli kongenital.

YK. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

01. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
 - 01.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

- 01.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 01.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan penilaian fungsi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 01.04. Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 01.05. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan primer.
- 02. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 02.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - 02.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - 02.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan penilaian fungsi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

- 02.04. Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 02.05. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- 03. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 03.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - 03.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - 03.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - 03.04. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan lainnya.
- 04. Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 04.01. Pemetaan Standar Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 04.02. Penilaian Teknologi Standar Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- 04.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Standar Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan serta penilaian fungsi standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.04. Fasilitasi Pemenuhan Standar Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pemenuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.05. Analisis Data dan Informasi Standar Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.06. Pembinaan Teknis Standar Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang standar alat kesehatan pelayanan kesehatan.
- 05. Pengujian dan Kalibrasi
 - 05.01. Penilaian dan Monitoring Pengamanan Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan monitoring pengamanan prasarana, sarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 05.02. Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 05.03. Analisis Data dan Informasi Pengujian dan Kalibrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan.
 - 05.04. Pembinaan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan.

YM. MUTU PELAYANAN KESEHATAN

01. Mutu Pelayanan Kesehatan

01.01. Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

01.02. Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di RS dan klinik utama.

01.03. Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional lainnya.

02. Akreditasi Pelayanan Kesehatan

02.01. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

02.02. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di RS dan klinik utama.

02.03. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional lainnya.

YP. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

01. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

01.01. Puskesmas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan puskesmas meliputi manajemen puskesmas, puskesmas sebagai wahana pendidikan, puskesmas rawat inap, non-rawat inap dan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial (PONED) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).

01.02. Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan di DTPK dan pelayanan kesehatan bergerak.

01.03. Keluarga Sehat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program keluarga sehat.

01.04. Integrasi Layanan Kesehatan Primer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program integrasi layanan kesehatan primer.

02. Pelayanan Klinik

02.01. Pelayanan Klinik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan klinik dan penunjang kesehatan klinik.

02.02. Pelayanan Darah (*Quickwins*)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan darah (*quickwins*) yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah dan RS.

02.03. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan FKTP berprestasi yang meliputi penyusunan instrumen penilaian, proposal CSR, dan penganugerahan.

03. Perizinan dan Registrasi Klinik

01.01 Pelayanan Klinik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan pelayanan modal asing dan non-pelayanan

modal asing, pelayanan kesehatan klinik, dan penunjang kesehatan klinik.

01.02. Praktik Perorangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan praktik perorangan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya).

01.03. Panduan Praktik Klinis dan Panduan Keterampilan Klinis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan panduan praktik klinis dan panduan keterampilan klinis.

YR. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

01. Standardisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan

01.01. Standar Pelayanan Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan implementasi standar pelayanan kedokteran di fasilitas kedokteran.

01.02. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penyediaan pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan rujukan.

01.03. Panduan Praktik Klinis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penerapan panduan praktik klinis dan *clinical pathway* di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

01.04. Audit Klinis RS dan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan audit medis/audit klinis RS.

02. Perizinan dan Pengembangan serta Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan

02.01. Perizinan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan kesehatan rujukan pada praktik perorangan, klinis, RS dan pelayanan kesehatan tingkat pertama lain serta pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya.

- 02.02. Pengawasan RS
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawas internal RS, dan badan pengawas RS.
- 03. Transformasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 03.01. Rujuk Balik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengelolaan rujuk balik di FKTP, penguatan integrasi pelayanan klinik dan praktik perorangan dan RS.
 - 03.02. Pelayanan Unggulan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan layanan unggulan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - 03.03. Jejaring Pelayanan Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi stratifikasi dan pengampunan jejaring pelayanan kesehatan rujukan untuk 9 (sembilan) penyakit prioritas.

YT. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

- 01. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
 - 01.01. Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional (Hattra)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan penyehat tradisional.
 - 01.02. Pembinaan Hattra
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program kegiatan pembinaan Hattra.
 - 01.03. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan SPA.
 - 01.04. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asuhan mandiri kesehatan tradisional dan penunjang.
 - 01.05. Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pemanfaatan TOGA.

- 01.06. Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asuhan mandiri dan penunjang pemanfaatan TOGA dan akupresur.
- 02. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
 - 02.01. Penilaian/Penapisan Kesehatan Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian/penapisan kesehatan tradisional.
 - 02.02. Pelayanan Kesehatan Komplementer Non Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan komplementer non tradisional.
 - 02.03. Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
 - 02.04. Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan FROTI.
 - 02.05. Tenaga Pengawas Kesehatan Tradisional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga pengawas kesehatan tradisional.
 - 02.06. Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.
 - 02.07. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan SP3T.
 - 02.08. Kelompok Kerja Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja nasional.
- 03. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
 - 03.01. Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium obat herbal asli Indonesia.

- 03.02. Pelayanan Medik Obat Herbal Asli Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik obat herbal asli Indonesia.
- 03.03. Pelayanan Medik Akupunktur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik akupunktur.
- 03.04. Pelayanan Akupresur di Puskesmas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan akupresur oleh tenaga kesehatan di puskesmas.
- 03.05. *Brainstorming* Pelaksanaan Kegiatan terkait Pelayanan Kesehatan Integrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *brainstorming* pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan kesehatan integrasi.
- 03.06. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional integrasi.
- 03.07. Pelayanan Akupresur di Puskesmas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan akupresur di puskesmas.

III. KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. SEKRETARIAT JENDERAL

- I. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- III. Kepala Biro Hukum
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IV. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- V. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VI. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VII. Kepala Biro Umum
 1. Kepala Bagian Rumah Tangga
- VIII. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IX. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 1. Kepala Bidang Perancangan Sistem dan Strategi
 2. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- X. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XI. Kepala Pusat Kesehatan Haji
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XII. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XIII. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal
- XIV. *Project Management Office* (PMO) Sekretariat Jenderal

B. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- III. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

- 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - IV. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - V. Direktur Kesehatan Jiwa
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VI. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - VIII. *Project Management Office* (PMO) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- C. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - II. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - III. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - IV. Direktur Pengelolaan Imunisasi
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - V. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VI. Direktur Penyehatan Lingkungan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - VIII. *Project Management Office* (PMO) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- D. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - II. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum

- III. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - IV. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - V. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VI. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - VIII. *Project Management Office* (PMO) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- E. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - II. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - III. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - IV. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - V. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VI. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - VIII. *Project Management Office* (PMO) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- F. DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - II. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum

- III. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IV. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- V. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VI. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VII. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VIII. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IX. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- X. *Project Management Office* (PMO) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

G. INSPEKTORAT JENDERAL

- I. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Inspektur I
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- III. Inspektur II
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IV. Inspektur III
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- V. Inspektur IV
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VI. Inspektur Investigasi
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VII. Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal
- VIII. *Project Management Office* (PMO) Inspektorat Jenderal

H. BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

- I. Sekretaris Badan
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - III. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - IV. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - V. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
 - VI. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - VII. *Project Management Office* (PMO) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
-
- I. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KESEHATAN
 - J. STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI KESEHATAN
 - K. STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN
 - L. STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN GLOBALISASI KESEHATAN

IV. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diharapkan akan menjadi acuan dalam penomoran dalam naskah dinas keluar, pemberkasan arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003